

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
I.1. <b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>I - 1</b>
I.2. <b>MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>I - 2</b>
I.3. <b>LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>I - 3</b>
I.4. <b>SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....</b>	<b>I - 4</b>
<b>BAB II : KONDISI UMUM .....</b>	<b>II- 1</b>
II.1. <b>Kondisi Pada Saat Ini .....</b>	<b>II- 1</b>
A. <b>Pelayanan Umum .....</b>	<b>II- 2</b>
B. <b>Ketertiban dan Keamanan .....</b>	<b>II- 4</b>
C. <b>Ekonomi .....</b>	<b>II - 6</b>
D. <b>Lingkungan Hidup .....</b>	<b>II-10</b>
E. <b>Perumahan dan Fasilitas Umum .....</b>	<b>II-12</b>
F. <b>Kesehatan .....</b>	<b>II-14</b>
G. <b>Pariwisata dan Budaya .....</b>	<b>II-16</b>
H. <b>Pendidikan .....</b>	<b>II-17</b>
I. <b>Perlindungan Sosial .....</b>	<b>II-20</b>
II.2. <b>MODAL DASAR DAN TANTANGAN .....</b>	<b>II-21</b>
II.2.1. <b>MODAL DASAR .....</b>	<b>II-21</b>
II.2.2. <b>TANTANGAN.....</b>	<b>II-22</b>
A. <b>Pelayanan Umum.....</b>	<b>II-22</b>
B. <b>Ketertiban dan Keamanan .....</b>	<b>II-26</b>
C. <b>Ekonomi.....</b>	<b>II-29</b>
D. <b>Lingkungan Hidup .....</b>	<b>II-31</b>
E. <b>Perumahan dan Fasilitas Umum .....</b>	<b>II-32</b>
F. <b>Kesehatan .....</b>	<b>II-36</b>
G. <b>Pariwisata dan Budaya .....</b>	<b>II-37</b>
H. <b>Pendidikan .....</b>	<b>II-39</b>
I. <b>Perlindungan Sosial .....</b>	<b>II-40</b>
II.2.3. <b>GAMBARAN TATA RUANG WILAYAH .....</b>	<b>II-40</b>
II.2.4. <b>POSISI KOTA MALANG DALAM KONSTELASI PROVINSI                     JAWA TIMUR .....</b>	<b>II-40</b>

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....	III- 1
III.1. ANALISIS PERMASALAHAN.....	III- 1
III.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup .....	III- 1
III.1.2. Demografi.....	III- 9
III.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam .....	III-15
III.1.4. Sosial Budaya dan Politik .....	III-21
III.1.5. Prasarana dan Sarana .....	III-25
III.1.6. Pemerintahan .....	III-31
III.1.7. Wilayah dan Tata Ruang .....	III-33
III.2. ISU-ISU STRATEGIS .....	III-40
III.2.1. Kondisi dan Isu Lokal Kota Malang .....	III-40
 BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025.....	 V- 1
IV.1. VISI .....	V- 2
IV.2. MISI .....	IV- 4
 BAB V : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025 .....	 V- 1
V.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 .....	V- 5
V.2. TAHAPAN SKALA PRIORITAS .....	V- 34
V.2.1. RPJM Ke-1 (2005-2009) .....	V- 34
V.2.2. RPJM Ke-2 (2010-2014) .....	V- 34
V.2.3. RPJM Ke-3 (2015-2019) .....	V- 34
V.2.4. RPJM Ke-4 (2020-2024) .....	V- 35
 BAB VI : PENUTUP .....	 VI-36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kota di Era Global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan kota yang sesuai dengan perkembangan kota yang pesat di segala bidang. Kota Malang 20 (dua puluh) tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin tinggi, serta perkembangan IPTEK yang semakin memperkuat pengaruh sosial-budaya masyarakat. Isu-isu global yang harus diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang antara lain; akan dihapusnya hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas pada tahun 2015; isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan; *millenium development goal's* sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera; serta isu-isu demokratisasi dan HAM dengan menempatkan pendekatan partisipasi pembangunan secara proporsional.

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing daerah menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang, harus tetap megacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi kedepan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan (*road map*) yang efektif.

Pembangunan Kota Malang dalam mewujudkan visi, serta mengemban misinya, diperlukan suatu upaya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dalam arti luas. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai perlu selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terus menerus. Permasalahan dan tantangan yang sedang dan/atau akan dihadapi harus disikapi secara positif dengan tetap memperhatikan peluang serta potensi untuk mendapatkan konsep perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Malang yang berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah disusun sebagai

penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional seperti diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Pembangunan Kota Malang selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang; sosial budaya dan kehidupan beragama; ekonomi; ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), politik; pertahanan dan keamanan; hukum dan aparatur; pembangunan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Prestasi pembangunan Kota Malang yang telah dicapai ditunjukkan antara lain dengan peningkatan pembangunan fisik serta capaian prestasi dan penghargaan baik ditingkat regional (propinsi), nasional bahkan internasional. Lebih dari 45 penghargaan yang diperoleh sampai pada akhir tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari prestasi atau penghargaan yang diterima Kota Malang pada Tahun 2009 yang mencapai 322 prestasi. Khusus di bidang pendidikan penghargaan yang diraih sejumlah 102 prestasi, dengan rincian untuk tingkat Propinsi Jawa Timur sejumlah 73 prestasi, tingkat Nasional sejumlah 27 prestasi dan tingkat Internasional sejumlah 2 prestasi. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kota Malang 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Kota Malang 20 tahun mendatang harus melakukan penataan kembali kelembagaan dan sekaligus membangun Kota Malang bagi kemajuan dan kemakmuran dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kota Malang. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memberikan dasar dan arah pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, maka disusunlah RPJP Daerah Tahun 2005-2025.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah Kota Malang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Maksud penyusunan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Malang 20 tahun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. (diadop dari provinsi) kecuali no. 3 dan penggunaan sumber daya diganti pengelolaan

Maksud disusunnya RPJP Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 adalah untuk memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Sedangkan tujuan disusunnya RPJP Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 adalah :

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
3. Menjamin tercapainya pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah).

### I.3 **LANDASAN HUKUM**[TI]

RPJP Daerah Kota Malang 20 tahun ke depan disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57).

#### **I.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Penyusunan RPJP Daerah Kota Malang 20 tahun ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Uraian dalam Bab I ini secara garis besar berisikan tentang: (1) Latar belakang penyusunan RPJP Daerah Kota Malang 2005-2025, yang menempatkan kedudukan strategis RPJP Daerah ini dalam pembangunan 20 tahun ke depan; (2) Maksud dan Tujuan penyusunan RPJP Daerah 2005-2025; (3) Landasan Hukum, berupa ketentuan-ketentuan perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah; (4) Sistematika penyusunan.

**Bab II : Kondisi Umum**

Uraian dalam Bab II ini secara garis besar berisikan tentang: (1) Kondisi Pada Saat Ini; (2) Modal Dasar dan Tantangan; (3) Gambaran Tata Ruang Wilayah; dan (4) Posisi Kota Malang dalam Konstelasi Provinsi Jawa Timur

**Bab III : Isu-Isu Strategis**

Uraian dalam Bab III ini secara garis besar berisikan tentang isu-isu strategis terkait dengan : (1) Kondisi internal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Demografi, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan, Pertahanan Keamanan, serta masalah Wilayah dan Tata Ruang; (2) Kondisi eksternal yang berkaitan dengan Isu-isu global, Nasional, Regional dan lokal;

**Bab IV : Visi dan Misi**

Uraian dalam Bab IV ini secara garis besar berisikan tentang: penetapan Visi dan Misi Kota Malang Tahun 2005-2025

**Bab V : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025**

Uraian dalam Bab V ini secara garis besar berisikan tentang: Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Pentahapan pembangunan sebagai pelaksanaan RPJP Daerah di lakukan melalui 4 (empat) tahapan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) Kota Malang, yaitu; (1) RPJPM Daerah ke-1 (2005-2009); (2) RPJPM Daerah ke-1 (2010-2014); (3) RPJPM Daerah ke-1 (2015-2019); dan (4) RPJPM Daerah ke-1 (2020-2024)

**Bab VI : Penutup**

Bagian penutup memberikan suatu abstraksi tentang esensi, kedudukan serta harapan akan tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang 20 tahun ke depan. Beberapa kondisi yang dipersyaratkan bagi terwujudnya rencana jangka panjang ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. sebagai catatan penting bahwa produk ringkas RPJP Daerah harus disebarluaskan dalam rangka menumbuhkan *sense of ownership* masyarakat terhadap RPJPD Kota Malang ini.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografi, sosial-budaya, ekonomi, dan politis. Pemahaman akan potensi dan permasalahan kondisi umum daerah menjadi penting untuk membuat analisis dan prediksi perencanaan strategis dalam rangka menyusun rencana jangka panjang daerah. Untuk itu pada bab ini akan diuraikan tentang (1) Kondisi Pada Saat Ini; (2) Modal Dasar dan Tantangan; (3) Gambaran Tata Ruang Wilayah; dan (4) Posisi Kota Malang dalam Konstelasi Provinsi Jawa Timur serta potensi dan permasalahan yang diproyeksikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yang akan menjadi isu penting dan signifikan mempengaruhi pembangunan Kota Malang, baik pada lingkup global, nasional, regional maupun lokal Kota Malang sendiri.

#### **II.1. KONDISI PADA SAAT INI**

Pembangunan Kota Malang yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan kota Malang 20 tahun ke depan.

##### **II.1.1. Pelayanan Umum**

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan pelayanan umum (*public services*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam arti luas. Fungsi pelayanan umum pada hakekatnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Peningkatan fungsi pelayanan umum perlu ditunjang dengan kemampuan profesionalisme aparat, pemanfaatan teknologi informasi serta pentingnya kesadaran semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Kelengkapan pranata hukum (Peraturan Daerah-Peraturan Daerah) termasuk produk-produk perencanaan pembangunan (RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, dan lain-lain) yang secara substantif mampu memberikan arah pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat mulai pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan pembangunan sampai dengan evaluasinya. Penyusunan perencanaan pembangunan (RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, dan lain-lain)



didorong dan difasilitasi untuk meningkatkan partisipasi baik melalui forum partisipasi publik seperti forum MUSRENBANG (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) maupun forum yang lainnya.

- b. Perkembangan pembangunan yang telah dicapai saat ini juga telah mengindikasikan adanya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Walaupun demikian upaya peningkatan pelayanan umum di semua sektor pembangunan harus terus ditingkatkan. Mengingat pertumbuhan penduduk Kota Malang yang cukup tinggi, maka kebutuhan pelayanan umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan) sarana dan prasarana pelayanan umum perlu untuk selalu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Pengembangan Kota Malang melalui proses pembangunan sebagai upaya sadar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dalam tingkat tertentu belum dapat mendistribusikan pertumbuhan wilayah secara merata dimana beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dan pesat, sementara yang lain tidak. Perbedaan akselerasi pertumbuhan wilayah ini diantaranya disebabkan adanya perbedaan kondisi alamiah, sumberdaya dan infrastruktur penunjang pertumbuhan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Disamping itu pertumbuhan wilayah yang pesat yang selalu diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik keruangan, sehingga pada tataran tertentu akan menjadi beban layanan yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- d. Tuntutan desentralisasi pembangunan ekonomi dan manajemen pemerintahan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang untuk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan manajemen pemerintah daerah, termasuk pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Namun tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan kualitas dari lembaga dan sumber daya (khususnya manusia) yang lebih tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah dan manajemen pemerintahan daerah.
- e. Untuk mengatasi dampak dari urbanisasi yang pesat, seperti kemacetan lalu lintas, penyebaran permukiman kumuh, penurunan mutu prasarana perkotaan, penurunan mutu lingkungan hidup, dan masalah sosial dan ekonomi, pemerintahan kota perlu melakukan reformasi manajemen perkotaannya. Perbaikan manajemen perkotaan dan pemerintahan pada saat ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Kebutuhan perubahan manajemen pemerintahan kota mencakup isu efisiensi, efektivitas dan pemerataan hasil – hasil pembangunan.

- f. Pada era demokratisasi, pembangunan prasarana dan sarana perkotaan harus diletakkan dalam konteks pembangunan perkotaan yang lebih luas dan menyeluruh, dengan memperbaiki proses perencanaan dan membangun agar pelaksanaannya dilakukan secara lebih transparan, lebih bertanggungjawab dan mengikutsertakan semua unsur masyarakat yang terlibat melalui proses partisipasi *stakeholders* yang kongkrit. Upaya membangun “*good governance*” ini bukan merupakan upaya yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tak terlepas dari upaya pembangunan perkotaan secara komprehensif dengan didukung oleh partisipasi aktif semua *stakeholders*.
- g. Peningkatan layanan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Saat ini Pemerintah Kota Malang sedang menyiapkan konsep dan prototype *Malang Smart City* yang akan menyatukan pulau-pulau jejaring Pemerintah Kota dengan internet hotel, Industri, ISP, Kampus, Perbankan, Polisi, Restoran, Rumah sakit, Sekolah, Warnet, Jardiknas dan jejaring potensial lainnya kedalam satu jaringan intranet Kota Malang di masa depan. Dari sisi aplikasi, Pemerintah Kota Malang menyiapkan *Malang Single Window*. Semua aplikasi dan *database* Pemerintah Kota Malang terintegrasi pada satu data center, pelayanan pada masyarakat cukup memulai portal Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang juga dapat memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah dan murah.

## **II.1.2. Ketertiban dan Keamanan**

- a. Perkembangan Kota Malang yang cukup pesat, selain memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi ternyata juga berdampak pada situasi ketentraman dan keamanan. Permasalahan merebaknya PKL yang cenderung tidak terkendali dapat berdampak negatif walaupun esensi sebagai aktifitas penunjang (*activity support*) kota keberadaanya dibutuhkan masyarakat. Kendala yang ditemui mayoritas dari kalangan ekonomi lemah yang menjadi PKL membutuhkan lokasi tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain PKL yang menempati ruang kota memiliki kecenderungan tidak tertata dengan baik. Penertiban yang dilakukan dengan putusan hakim tentang denda dalam sidang tipiring relatif kecil (ringan) sehingga tidak menumbuhkan efek jera. Oleh karena itu diperlukan upaya kongkrit dari Pemerintah daerah yang lebih mendudukan PKL sebagai mitra aktifitas kota, dengan penataan yang baik dan meminimalkan dampak sosialnya.
- b. Permasalahan ketertiban secara berkelanjutan harus lebih ditingkatkan dengan upaya-upaya penegakan/ketertiban dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang ada. Peraturan

Daerah-Peraturan Daerah yang secara intensif dimonitor pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Selama tiga tahun terakhir (2005 s/d 2007) terjadi peningkatan penegakan ketertiban hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan sidang tipiring, tahun 2005 sebanyak 1133 kasus, tahun 2006 sebanyak 1298 kasus, dan tahun 2007 (s/d bulan september) sebanyak 1090 kasus. Semakin banyaknya kasus yang ditangani sebenarnya bisa dimaknai semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, tetapi dalam konteks penegakan ketertiban hal ini merupakan upaya yang positif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan.

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah harus dilakukan melalui upaya sosialisasi Peraturan Daerah, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah secara proporsional dan profesional. Dari sisi substansi pengaturan perlu juga dilakukan reformasi pendekatan penegakan peraturan yaitu pendekatan yang lebih humanistik yang dilanjutkan dengan pemberian rewards and punishment.

### **II.1.3. Ekonomi**

- a. Permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan adalah pertumbuhan yang tidak seimbang antar wilayah dalam kota, antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil. Kesenjangan pertumbuhan wilayah kota berimplikasi munculnya permasalahan perkotaan, antara lain meliputi: (1) belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan dalam hal menarik investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan; (2) kualitas lingkungan fisik kawasan kota yang memiliki kecenderungan degradasi kualitas lingkungan kota; (3) kualitas hidup (sosial) masyarakat yang menurun karena permasalahan sosial-ekonomi, serta karena penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

- b. Laju pertumbuhan ekonomi sebelum krisis 1997 yang cukup tinggi lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurusan sumber daya alam daripada peningkatan dalam produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Pasca krisis ekonomi, terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian seperti itu akan sulit berkembang jika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, terlebih lagi pada saat ini memasuki era perekonomian dunia yang makin terbuka.
- c. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing, terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi. Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian kota.
- d. Kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Marginalisasi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dihindarkan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan yang merata disetiap kawasan, dengan menggali dan mengembangkan keunggulan kompetitif daerah, serta diterapkannya

kebijakan-kebijakan pemenuhan hak kebutuhan dasar yang berpihak kepada masyarakat.

- e. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya dalam satu kesatuan sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Keterpaduan pengembangan potensi daerah yang berbatasan dengan wilayah administratif kota Batu dan/atau Kabupaten Malang, perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan peran dan potensi pengembangan perekonomian kota oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, keterkaitan dengan pengembangan sektor-sektor di wilayah sekitarnya, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan, yaitu unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan berinvestasi di daerah.
- f. Produk unggulan di Kota Malang yang beraneka ragam, memiliki peluang pasar cukup besar misalnya mulai produk tempe dimana lokasi sentra industri tempe dan kripik Sanan ini, terletak di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing dan daerah peluang pemasarannya selain Malang, juga di Surabaya, Jakarta, Bali, Kalimantan. Kemudian selain produk unggulan tempe, di Kota Malang ada Produk unggulan lain misalnya Produk industri kerajinan gerabah merah Penanggungan yang terletak di Kelurahan Penanggungan dimana daerah peluang pemasarannya selain di Kota Malang juga di Kota Surabaya, Kediri, Probolinggo dan Jember.
- g. Produk unggulan lainnya industri kerajinan keramik terletak di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru dan daerah pemasarannya di Malang, Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bali. Produk unggulan lainnya selain sentra industri di atas, produk unggulan lain adalah produk Rotan yang berlokasi di Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru yang daerah pemasarannya sudah eksport luar negeri yaitu ke Amerika Serikat dan Korea.
- h. Produk-produk unggulan di atas memiliki peluang pasar di kota-kota lain cukup besar. Permintaan barang sangat banyak namun kapasitas produksinya masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan, sehingga kapasitas produksi perlu dilakukan pembenahan dengan jalan promosi dan pemasaran secara maksimal dan ada pembenahan tempat industri yang lebih

presentatif yang memungkinkan perusahaan dapat memproduksi secara optimal. Sedangkan untuk pesaing dari luar Kota Malang dapat diantisipasi dengan membuat jaringan pemasaran.

#### II.1.4. Lingkungan Hidup

- a. Strategi pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan “pemerataan” telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial. Pendekatan pembangunan harus disertai dengan nilai kelestarian pembangunan atau *sustainable development* untuk menumbuhkan *self sustaining capacity* masyarakat. Ini bermakna bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia (*people-centered development*). Strategi ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai realisasi Otonomi Daerah (OTODA), berimplikasi pada perubahan paradigma pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa; dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan swasta; dan Pengikutsertaan masyarakat, merupakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Paradigma pembangunan kota diarahkan pada strategi *people-centered development*. Strategi ini merupakan strategi yang mendekati konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- b. Pemahaman *sustainable development* sebenarnya bukan semata-mata keberlanjutan dalam pemahaman perubahan sosial-budaya masyarakat, tetapi keberlanjutan dalam pengertian luas termasuk aspek ekologi (*sustainable environment*). Terpeliharanya kualitas lingkungan secara ekologis, sosial-budaya dan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai setiap upaya pembangunan kawasan kota. Upaya pemanfaatan ruang kota juga harus memperhatikan kepentingan tuntutan pengembangan (fungsi ruang), kelestarian lingkungan serta kepentingan hajat hidup masyarakat di sekitar kawasan.
- c. Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di pusat kota, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi dan industri yang tidak didiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada

lingkungan perkotaan. Sungai-sungai diperkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidak seimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

- d. Pelaksanaan pembangunan di Kota Malang saat ini masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, (b) secara substantif rencana tata ruang belum/tidak dapat berfungsi sebagai panduan pembangunan yang operasional, (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Rencana dan Rancangan kota (rencana tata ruang) sebagai produk pengatur saat ini belum memberikan stimulus masyarakat untuk berbondong-bondong untuk menjalankannya. Seperti produk peraturan perundangan yang lain, nuansa peraturan penataan ruang lebih menekankan aspek *punishment* bagi yang melakukan pelanggaran. Sedangkan bagi yang dengan baik melaksanakan, atau bahkan memberikan nilai lebih bagi peningkatan kualitas rancangan tidak diberikan suatu penghargaan. Kiranya perlu dilakukan reformasi terhadap hal ini, perlu pendekatan baru melalui pemberian insentif/bonus untuk masyarakat yang memberikan nilai lebih dari kualitas standart yang diharapkan dalam peraturan tersebut.

#### **II.1.5. Perumahan dan Fasilitas Umum**

- a. Peningkatan jumlah penduduk Kota Malang yang relatif tinggi, serta kecenderungan peningkatan kegiatan sektor pendidikan telah memacu lebih

cepat peningkatan jumlah perumahan serta tuntutan peningkatan fasilitas umum. Pembangunan perumahan baru berimplikasi pada perubahan fungsi lahan pertanian mejadi fungsi perumahan. Kecenderungan pembangunan perumahan skala menengah-kecil dengan tidak dilengkapi dengan pemenuhan fasilitas umum yang memadai dapat mengakibatkan ketidak seimbangan perkembangan wilayah kota. Kluster-kluster perumahan skala kecil yang secara sporadis berkembang di lahan-lahan pertanian perlu diantisipasi dan dievaluasi untuk kepentingan pembangunan perumahan yang ideal dengan kelengkapan fasilitas umum yang memadai.

- b. Kawasan kumuh yang ada di Kota Malang banyak berada di sekitar kawasan DAS Brantas, mempunyai kondisi lingkungan yang relatif kurang baik. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya pendirian rumah yang dibangun masyarakat atau yang berdiam disitu dan tidak disertai penataan, sehingga menambah permasalahan seperti sistem jaringan jalan, sistem drainase, pelayanan air bersih fasilitas penunjang, serta menambah beban pencemaran di DAS Brantas. Kecenderungan kekumuhan pada daerah aliran sungai (DAS) Brantas dapat dihindarkan dengan mengembangkan konsep pengembangan *waterfront* dengan menempatkan DAS sebagai daerah depan.
- c. Upaya-upaya pengendalian serta perlindungan terhadap kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peraturan teknis yang mengatur pemanfaatan Kawasan DAS tertuang dalam Petunjuk Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Tepi Air. Selain perangkat peraturan tersebut, sebenarnya pemerintah kota telah mengeluarkan perangkat hukum (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pemanfaatan daerah “bantaran” sungai. Walaupun demikian kita juga harus menyadari bahwa permasalahan pengendalian dan penataan Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) saat ini bukan hanya masalah teknis penataan fungsi ekologis saja, tetapi justru masalah sosial masyarakat di KTAS merupakan masalah yang sangat pelik. Dalam tataran operasional kenyataannya perangkat peraturan sebagai “pengendali” belum mampu berperan optimal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kongkrit yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dalam pemanfaatan kawasan DAS.
- d. Kualitas lingkungan DAS dan kualitas air sungai sangat bermanfaat selain untuk meningkatkan fungsi ekologis kota. Kawasan DAS sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber daya air maupun untuk



pengembangan fasilitas-fasilitas umum seperti taman kota, maupun taman rekreasi. Kota Malang yang dilintasi oleh lima yakni Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Sukun, Sungai Bangau dan Sungai Amprong yang memiliki potensi lingkungan yang strategis untuk pengembangan perumahan dan fasilitas umum dengan mengembangkan konsep *waterfront*.

#### **II.1.6. Kesehatan**

- a. Tujuan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan adalah untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional. Status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya, yang ditandai, antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya angka kematian bayi dan balita. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.
- b. Umur harapan hidup penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat berarti. Dibandingkan dengan penduduk perempuan, ternyata penduduk laki-laki memiliki umur harapan hidup lebih rendah. Namun demikian, umur harapan hidup penduduk Indonesia tersebut atau umur harapan hidup penduduk Jawa Timur juga sudah menggambarkan umur harapan hidup penduduk Kota Malang. Meningkatnya umur harapan hidup ini, secara tidak langsung, memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan penduduk Indonesia, sehingga diharapkan juga akan dapat menurunkan angka kematian.

#### **II.1.7. Pariwisata dan Budaya**

- a. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan baik sebagai konsumsi wisatawan asing maupun domestik. Perkembangan wisata di Kota Malang yang dari hari ke hari terus berbenah sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Kota Malang potensial sebagai tempat berkembangnya bisnis pariwisata, terutama wisata kota (*sightseeing*). Selain itu pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tentunya harus digali terus potensinya. Sektor pariwisata yang dalam

“jargon“ atau motto Tri Bina Cita Kota Malang (Pendidikan-Pariwisata dan Industri), perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi potensi dan permasalahan yang saat ini dihadapi Kota Malang. Relevansi Tri bina cita tersebut, saat ini sektor pendidikan merupakan bidang yang masih sangat relevan untuk dikembangkan. Sektor pariwisata pengembangannya lebih ditekankan pada pariwisata pendidikan atau penunjang pendidikan.

- b. Di Kota Malang daerah yang teridentifikasi memiliki Benda Cagar Budaya (BCB) yang perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya antara lain terdapat pada : Lembah Sungai Metro, Sungai Brantas, Sungai Bango, Kalisari, Gunung Buring, Polowijen, Kutobedah, dan lain sebagainya. Selain itu Kota Malang juga terdapat bangunan-bangunan peninggalan jaman kolonial banyak dijumpai di sekitar pusat kota seperti Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Dinas Perbendaharaan dan Kas Negara, Bangunan Gereja misalnya Gereja Cathedral Hati Kudus, Gedung Sekolah misalnya Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Ijen, di sekitar jalan gunung-gunung, dan sebagainya.
- c. Konsep wisata kota tidak hanya bisa dinikmati oleh wisatawan, namun juga secara aktif akan dimanfaatkan oleh komunitas lokal. Oleh karena itu kondisi lingkungan dan kenyamanan kota sebagai daya tarik utama dalam konsep wisata kota merupakan suatu hal yang utama. Salah satu daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan Kota Malang adalah persepsi atas kesejukan dan keasrian lingkungan kota, yang pada saat ini banyak mengalami degradasi karena tingginya tuntutan penggunaan lahan dan upaya pemanfaatan nilai ekonomis lahan, selain juga ditopang dengan perubahan iklim global.
- d. Selain konsep wisata kota yang mengandalkan pada keasrian dan kesejukan, Kota Malang juga memiliki nilai historis yang kuat yang dapat menjadi aset utama kota dalam pengembangan pariwisata. Kota Malang merupakan salah satu kota di pulau Jawa yang direncanakan secara lengkap oleh Herman Thomas Karsen pada jaman kolonial, dan meskipun seiring perkembangan waktu terdapat banyak perubahan, namun beberapa peninggalan bangunan dan pola tata ruang kota masih terlihat dan dapat disaksikan.

### **II.1.7. Pendidikan**

- a. Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas, meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi (APK dan APM) sekolah untuk semua kelompok usia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antar daerah, dan adanya disparitas gender.
- b. Kota Malang sebagai kota Pendidikan terbesar di Jawa Timur karena banyaknya fasilitas-fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkatan taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi dan jenis pendidikan non formal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer, serta kursus lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Ini merupakan aset bagi perkembangan wajah Kota Malang ke depan sebagai Kota Pendidikan.
- c. Kemajuan pendidikan di Kota Malang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota Malang menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau seluruh daerah.
- d. Pemberlakuan UU Dosen dan Guru, khususnya yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi guru dan dosen secara nasional merupakan salah satu jalan keluar atas permasalahan peningkatan kualitas pendidik (guru dan dosen). Pemerintah kota memiliki tanggungjawab atas terpenuhinya standart dan kualifikasi guru seperti yang diharapkan. Seperti diamanahkan dalam UU tersebut, maka peningkatan kompetensi mengajar akan berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan guru yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Tingkat pemerataan kesempatan pendidikan dari tingkatan PAUD/Prasekolah (TK) sampai dengan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dapat dilihat dari indikator-indikator seperti APK (Angka

Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), rasio siswa per sekolah, per kelas, per guru, kelas per ruang dan kelas per guru dan tingkat pelayanan sekolah. Trend perkembangan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Malang untuk beberapa tahun kedepan akan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan perkembangan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- f. Adanya daya tarik Kota Malang sebagai kota pendidikan termasuk kondisi sosial budaya, mendorong terciptanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
- g. Faktor-faktor negatif yang saat ini merusak pembangunan pendidikan di Kota Malang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, misalnya komersialisasi penyelenggaraan pendidikan dan adanya pengaruh budaya luar yang bersifat negatif sebagai dampak globalisasi.
- h. *Human Capital* untuk masa mendatang akan menjadi isu utama. Kapasitas dan kompetensi SDM di sebuah komunitas akan menjadi salah satu faktor penting menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek yang terkait dalam *human capital investment* sehingga dalam jangka panjang akan menjadi salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Malang. Pelayanan pendidikan yang baik akan menghasilkan *output* SDM yang berkualitas dan mempunyai *competitive advantage* yang berdaya saing tinggi. Apabila prinsip-prinsip ini tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka potensi SDM yang unggul tersebut justru akan menjadi beban dalam pembangunan.

#### **II.1.8. Perlindungan Sosial**

- a. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Disamping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pencandu narkotik dan obat terlarang.
- b. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan

beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antar umat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **II.2. MODAL DASAR DAN TANTANGAN**

### **II.2.1. MODAL DASAR**

Modal Dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan digunakan seluruh masyarakat Kota Malang dalam pembangunan daerah.

- a. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, secara geografis terletak pada Posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha dengan iklim yang sejuk sehingga menjadi tujuan untuk beristirahat.
- b. Kota Malang mempunyai perguruan tinggi yang sangat banyak sehingga dapat dijadikan sebagai tempat pendidikan keluarga.
- c. Kota Malang merupakan kota yang sudah cukup tua sehingga dapat menjadi tempat tujuan wisata sejarah
- d. Kota Malang sudah mempunyai “citra” yang cukup baik dalam hal produksi baik kerajinan, pertanian maupun manufaktur.
- e. Kota Malang merupakan kota yang mempunyai perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi tujuan bagi investor dalam menanamkan investasinya.
- f. Kualitas SDM Kota Malang sangat bagus sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan yang handal

- g. Kondisi keamanan dan kehidupan berpolitik di Kota Malang sangat kondusif sehingga dapat mempercepat kemajuan daerah

## II.2.2. TANTANGAN

### a. Pelayanan Umum

1. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang masih cukup tinggi. Laju pertumbuhan dimaksud disamping karena tingkat kelahiran juga disebabkan oleh migrasi baik dari daerah *hinterland* maupun migrasi karena aspek pembangunan pendidikan di Kota Malang. Keberhasilan pembangunan Kota Malang dalam 20 tahun kedepan tentunya akan semakin mendorong peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan pengembangan tata ruang yang dapat menjamin pola distribusi akifitas penduduk, serta pola pergerakan penduduk kota dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya.
2. Pemecahan/pengembangan wilayah di Kota Malang terutama bila ditinjau dari segi geografis dan demografis dilakukan pada kelurahan yang wilayah tidak terlalu luas tetapi jumlah penduduknya besar dan kelurahan yang wilayahnya luas tetapi penduduknya relatif sedikit. Oleh karena itu mengingat implikasi yang besar dari kebijakan pemecahan/pengembangan wilayah maka telah dilakukan pengkajian yang mendalam melalui pendekatan komprehensif baik pendekatan fisik keruangan, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan kelembagaan. Dari hasil survey dan pemetaan kondisi dan potensi wilayah setelah dilakukan analisa, maka kecamatan di Kota Malang dan 12 (dua belas) kelurahan layak untuk dilakukan pemecahan/pengembangan.
3. Guna mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik, diperlukan adanya penegakan disiplin dan pemahaman akan prinsip dasar tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :
  - a. Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi ataupun perlakuan khusus terhadap lapisan masyarakat tertentu.
  - b. Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-

unit pengawasan (masyarakat dan lembaga institusi terkait) terhadap kinerja pemerintah, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat diketahui dan diawasi secara profesional.

- c. **Transparansi** (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu (*up date*).
  - d. **Responsibilitas** (*responsibility*). Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab pemerintah sebagai bagian dari *stake holders* untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.
5. Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam peranan pemerintah Kota Malang (institusi birokrasi) dalam penyelenggaraan pembangunan. Peran pemerintah pusat dalam pembangunan yang sangat dominan menjadi peran yang semakin berkurang; sejalan dengan semakin besarnya peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan ini sangat ditentukan keberhasilannya oleh institusi birokrasi pemerintah kota itu sendiri. Pembentukan birokrasi pemerintah (dalam hal ini perangkat pemerintah daerah), sebelum era otonomi daerah (2001) sangat diwarnai dengan nuansa sentralistik (menekankan pada *physical structure*), dimana semuanya ditentukan oleh pusat, setelah tahun 2001 kelembagaan pemerintah daerah semakin memperhatikan nuansa lokal (menekankan pada *logical structure*). Tantangan ke depan terkait dengan aspek kelembagaan pemerintah ini adalah kelembagaan Pemerintah Kota Malang semakin dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; yang dapat selalu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan dan berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, teknologi dan informasi.

6. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pengaturan di dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Malang. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang dapat menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu hasilnya kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Baik aspek kebijakan dan operasional sejak bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikannya.
7. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga pelaksanaan penguatan asas desentralisasi memerlukan perangkat peraturan perundangan yang mendukung. Upaya mengikutsertakan masyarakat (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik. Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika tercipta supremasi hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Malang telah bersemangat untuk menuju ke arah *Good Governance*.

**b. Ketertiban dan Keamanan**

1. Dalam 20 tahun mendatang, Malang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Untuk mewujudkan visi pembangunan kota, perlu diteruskan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke dalam suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.



2. Berkembangnya kehidupan demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat mempercepat terwujudnya tuntutan reformasi. Hal ini akan segera mengembalikan suasana ketentraman dan ketertiban daerah sebagai persyaratan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dan dunia usaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prespektif pendelegasian urusan tersebut ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar di atas menjadi landasan dan kriteria bagi pelaksana pembagian utama fungsi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan pemahaman ini, masing—masing jenjang pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan sekaligus peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama secara nasional. Pemerintah Kota Malang dalam banyak hal telah aktif mendorong iklim kehidupan demokratis, penegakan supremasi hukum dan mendorong sektor swasta untuk berkembang.
3. Melihat perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik, ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa persoalan-persoalan dalam negeri tidak dapat dilepas dari faktor internal, faktor eksternal atau internasional. Keterkaitan dan akumulasi pengaruh domestik dan internasional kemudian membawa akibat pada bentuk eskalasi – ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban nasional, dan pada skala yang lebih besar dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kota Malang saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial seperti pedagang kaki lima, pengangguran, kejahatan, dan premanisme yang masih dijumpai di Kota Malang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tercatat adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah di sektor informal perkotaan, perumahan dan kependudukan. Keadaan itu juga diperparah dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas seperti narkoba/psikotropika dan gangguan ketertiban umum.
4. Upaya pengembangan budaya tertib hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum serta Peraturan Daerah melalui upaya peningkatan dan pengadaan serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan terus selalu ditingkatkan, hal ini tercermin dengan memberikan peluang kepada mahasiswa di Kota Malang untuk menyampaikan aspirasinya tentang penegakan HAM dan supremasi hukum baik secara tertulis hingga aksi turun kejalan telah difasilitasi.

### c. Ekonomi

1. Penekanan akan perlunya pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian tumbuh baik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan perkapita, menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin, serta tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Ekspor *non* migas yang menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk dan daya saing produk nasional dan terhadap produk negara lain meningkat pesat.
3. Beberapa kemajuan dicapai dalam pembangunan Kota Malang. Dan sisi politis penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta perkembangan sub-sub penyangga kegiatan pusat telah memberikan ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Disamping itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh kota telah mengalami peningkatan. Meningkatnya akses masyarakat kepada jaringan infrastruktur (khususnya transportasi dan telekomunikasi) maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun dernikian peningkatan kondisi sosial dan ekonomi tersebut relatif tidak merata dan sangat bervariasi antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain dalam wilayah Kota Malang.
4. Kebijakan pembangunan kota dalam beberapa hal mengalami kendala khususnya dalam konsentrasi pertumbuhan sektor ekonomi. Kendala ini mengakibatkan kesenjangan yang pada gilirannya menimbulkan beberapa eksekusi negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain; (1) menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pendukung perkotaan di pusat kota (Pasar Besar dan Daerah Kayu Tangan) dan lainnya yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah pusat kota dan pinggiran kota; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; (3) keberadaan daerah kantong miskin, pengangguran, serta rendahnya produktivitas.

5. Kondisi Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan pendidikan global menjadikan Kota Malang ramai akan pelajar dan mahasiswa pendatang dalam jumlah yang cukup banyak, hal ini menjadi satu potensi tersendiri terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kongkritnya penyediaan rumah kos-kosan dan bentuk usaha dalam berbagai jenis lainnya yang dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi masyarakat secara langsung. Meskipun hal tersebut juga dapat menjadikan suatu permasalahan tersendiri yang disebabkan kompleksnya hubungan antara para pendatang dengan masyarakat sekitarnya.

#### **d. Lingkungan Hidup**

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan memberikan diseminasi dan sosialisasi informasi peringatan dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penerapan proses pembangunan dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang memberikan perhatian pada prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
2. Kota Malang dalam beberapa hal terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan masih menyisakan persoalan. Persoalan tersebut antara lain semakin tumbuh suburnya pembangunan ruko yang terkesan tanpa perencanaan yang memadai, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau. Konsekwensi di masa mendatang konsep pembangunan Kota Malang harus dikembalikan pada konsep pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan *Garden City* / Kota Taman, karena sejak awal berdirinya Kota Malang Konsep inilah yang dipakai oleh Thomas Karsteen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mempersyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau (baik privat maupun publik).
3. Percepatan pembangunan di Kota Malang menghasilkan berbagai permasalahan dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan

lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar daya dukung lingkungan yang merupakan kebutuhan masyarakat.

4. Hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan alam tetumbuhan mengakibatkan keadaan lingkungan di perkotaan menjadi hanya maju secara ekonomi namun mundur secara ekologi, padahal kestabilan kota secara ekologi sangat penting, sama pentingnya dengan kemajuan secara ekonomi. Hal ini terlihat masih sering terjadinya alih fungsi daerah resapan dan hutan kota menjadi daerah komersial.
5. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan serta ditindaklanjuti dalam tingkat yang lebih detail dalam lingkup kawasan.

**e. Perumahan dan Fasilitas Umum**

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2001-2010 menjadi pedoman untuk :
  - a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang;
  - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kota Malang serta keserasian antar sektor;
  - c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kota Malang;
  - d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kota Malang;

- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan Kota Malang.
2. Pembangunan penataan ruang Kota Malang telah diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan masing-masing fungsi pengembangan.
  3. Sarana dan prasarana kota sebagai pendukung masyarakat dalam sistem ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan kesejahteraan adalah penting. Pertumbuhan penduduk disebabkan banyak faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan pola kehidupan sosial yang lebih atraktif. Ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang cenderung lebih baik menjadikannya sebagai tempat menarik untuk didatangi. Faktor-faktor tersebut bersifat dinamis dan akan selalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kota Malang. Aspek ini di Kota Malang masih menyisakan persoalan, antara lain rasio kapasitas jalan dengan jumlah moda pengguna tidak seimbang sehingga terjadi kemacetan pada daerah tertentu.
  4. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Perimbangan keterlibatan tiga *stakeholders* utama Kota Malang yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.
  5. Arah pembangunan infrastruktur Kota Malang diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota; pengembangan aliran sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Arah pembangunan daya saing wilayah kota dalam beberapa hal belum memanfaatkan secara maksimal fungsi tata ruang wilayah; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan menyinergikan antarwilayah; peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan; dan peningkatan kerjasama antardaerah.
  6. Berbagai eksekutif tersebut, secara bersama-sama membentuk sebuah isu permasalahan yang sentral bagi pembangunan Kota Malang, yaitu tingginya konsentrasi pembangunan di wilayah pusat kota (termasuk kawasan Jl Veteran/ Matos). Pengurangan kesenjangan pembangunan

antar wilayah kecamatan perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kota, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kota. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan dan kelurahan adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar kelurahan di Kota Malang.

7. Kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan di Kota Malang pada dasarnya adalah akibat kelalaian atau kesengajaan oleh masyarakat dan pemerintah, seperti kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan atau penampung air hujan dijadikan kawasan perumahan atau bentuk pemanfaatan lain yang secara nyata menghalangi dan mengurangi daya resap tanah terhadap air hujan, dampak langsungnya akan terjadi banjir apabila terjadi hujan.
8. Keberpihakan pemerintah daerah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketinggalan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antara wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat kota cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan. Untuk itu, perlu didukung dengan adanya skema pemberian dana anggaran, termasuk jaminan pelayanan publik dan perintisan.

#### **f. Kesehatan**

1. Pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian yang memadai yaitu dengan meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perkotaan untuk berperilaku sehat. Peningkatan derajat kesehatan dan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menyebabkan perubahan pola hidup sebagian masyarakat. Oleh karena

itu tantangan ke depan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan perubahan lingkungan.

2. Perkembangan Kota Malang yang mengarah pada Kota Metropolitan akan menyebabkan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kota Malang untuk menyikapi dengan melakukan perencanaan di bidang kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan pengawasan secara terus menerus agar tercipta kondisi yang bagus bagi tumbuhnya investasi di bidang kesehatan.

#### **g. Pariwisata dan Budaya**

1. Potensi kepariwisataan Malang Raya sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Malang Raya merupakan tujuan wisata unggulan bagi propinsi Jawa Timur. Malang Raya yang meliputi tiga daerah administrasi yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ketiga kawasan tersebut membawa visi dan misi masing-masing dalam cakupan wilayah administrasi dan kalau dilihat dari Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi fungsi pariwisatanya maka Kota Malang merupakan pusat akomodasi, Kabupaten Malang merupakan pusat Wisata Budaya dan Lautnya, sedangkan Kota Batu merupakan pusat wisata alam pegunungan dan wisata konvensi.
2. Selama ini Kota Malang lebih merupakan daerah penopang (*feeder*) bagi aktivitas wisata di kawasan Malang Raya yaitu menjadi penyedia jasa perdagangan yang berupa *supermarket*, pasar dan pusat Perdagangan dan juga penyedia jasa akomodasi. Hal tersebut disebabkan karena secara umum Kota Malang tidak memiliki objek wisata dan daya tarik unggulan yang secara umum dan nasional dikenal secara spesifik. Oleh karena itu konsep pengembangan pariwisata Kota Malang akan lebih difokuskan pada penataan dan mengembalikan citra kota sebagai kota yang sejuk, asri, dan hijau yang ditopang dengan vegetasi pelindung dan dihiasi berbagai bunga sebagai pelengkap.

#### **h. Pendidikan**

1. Peningkatan pendidikan yang sedemikian pesat, harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat Kota Malang berupa pemberian kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diseluruh wilayah yang disertai dengan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.

2. Peningkatan mutu pendidikan menjadi tantangan tersendiri, karena daya saing di bidang pendidikan sangat tergantung dari kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka peningkatan mutu SDM di bidang pendidikan harus terus menerus dilakukan sehingga Kota Malang bisa menjadi Kota pendidikan yang bertaraf internasional.
3. Terwujudnya pembangunan pendidikan di Kota Malang sebagai *education society* yaitu pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan masyarakat Kota Malang harus menjadi masyarakat yang gemar belajar. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan non formal yang sejajar dengan pendidikan formal. Peningkatan pendidikan non formal dimaksud harus pula dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana/sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.

#### **i. Perlindungan Sosial**

Perkembangan Kota Malang yang sedemikian pesat, akan memberikan dampak banyaknya penyandang masalah sosial yang datang ke Kota Malang. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial harus dilakukan dan harus melibatkan banyak pihak. Sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial perlu terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

### **II.3. GAMBARAN TATA RUANG WILAYAH**

Kota Malang merupakan Kota Orde P-3 di Propinsi Jawa Timur. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 11.006 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 807,136 jiwa. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yang nantinya akan dilakukan pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan pada jumlah penduduk Kota Malang yang berjumlah kurang dari 1.000.000 jiwa maka Kota Malang tergolong dalam kota besar, dimana tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan menjadi Kota Metropolitan dengan jumlah Penduduk yang lebih besar lagi.



Berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan visi dan misi Kota Malang, maka Rencana pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:

1. Rencana Kawasan Lindung;

a. Kawasan Lindung Setempat;

Kawasan Lindung Setempat meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi.

b. Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan rawan bencana di Kota Malang adalah kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir. Kawasan Rawan Bencana di Kota Malang adalah Kelurahan Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, dan Kotalama.

c. Kawasan Cagar Budaya;

Kawasan cagar budaya meliputi lingkungan cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan penanda atau jatidiri pembentukan kota. Lingkungan Cagar Budaya meliputi lingkungan Candi Badut, Lingkungan Candi Tidar, Lingkungan Gunung Buring, Situs Tlogo Mas, dan Lingkungan Polowijen. Bangunan cagar budaya meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan penanda kota, antara lain Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen.

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Penyediaan RTH di Kota Malang meliputi RTH Publik dan Privat.

1) Rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha meliputi:

- a) Taman kota seluas kurang lebih 3,5 Ha;
- b) Taman rekreasi seluas kurang lebih 10 Ha;
- c) Hutan kota seluas kurang lebih 11 Ha;
- d) Cagar alam seluas kurang lebih 0,04 Ha;
- e) Pemakaman umum seluas kurang lebih 173 Ha;
- f) Lapangan olah raga dan upacara seluas kurang lebih 166 Ha;
- g) Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) seluas kurang lebih 192 Ha;
- h) Sempadan badan air seluas kurang lebih 225 Ha;

- i) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian seluas kurang lebih 283 Ha; dan
  - j) Kawasan dan jalur hijau/jalur tengah seluas kurang lebih 24 Ha.
  - k) Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang seluas kurang lebih 1.263 Ha.
- 2) Rencana penyediaan RTH Privat di Kota Malang seluas kurang lebih 1.383 Ha meliputi:
- a) Taman lingkungan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan gedung komersial seluas kurang lebih 1.064 Ha;
  - b) Parkir terbuka seluas kurang lebih 319 Ha.
2. Rencana Kawasan Budidaya.
- a. Kawasan perumahan;
- Pengembangan perumahan diarahkan pada pembangunan rumah bertingkat (vertikal) dan layak huni. Lokasi pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan prasarana lingkungan pada perumahan wajib dicantumkan dalam rencana tapak (*site plan*).
- Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, melalui:
- 1) Secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara;
  - 2) Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana;
  - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai.
- Pemerintah Daerah melarang pendirian permukiman penduduk di sempadan rel kereta api. Pemerintah Daerah melindungi kawasan sempadan kereta api.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- 1) Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Pasar Tradisional adalah sebagai berikut :
    - a) Kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya (pasar basah) tetap menggunakan Pasar Induk Gadang dan dikembangkan ke arah areal eks Terminal Gadang;
    - b) Perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah dilayani oleh pasar yang tersebar di Daerah, antara lain Pasar Gadang,

Kebalen, Madyopuro, Klojen, Tawangmangu, Blimbing, Oro-oro Dowo, Dinoyo, Bunul, Bareng, Kasin, Sukun.

- 2) Rencana pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
  - a) Peningkatan kualitas Pasar Besar, Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing, dan Pasar Tawangmangu serta penambahan Pasar baru di sub wilayah Malang Timur dan Timur Laut;
  - b) Pengembangan Pasar Burung dan Pasar Bunga di Kawasan Splendid;
  - c) Mengarahkan pendistribusian secara merata fasilitas perdagangan dan jasa pada pendistribusian di daerah pinggiran; dan
  - d) Mendorong pengembangan fasilitas perdagangan berupa warung oleh masyarakat secara swadaya.
- 3) Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
  - a) Perdagangan barang campuran, antara lain *garment*, elektronik dan jasa mulai dari Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Jaksa Agung Suprpto, sepanjang Jl. Letjend Sutoyo, Jl. Letjend S. Parman, dan Jl. Jend. Ahmad Yani;
  - b) Keberadaan pasar swalayan atau plaza pada kawasan pusat kota pengembangannya dibatasi dan diarahkan pada kawasan yang baru berkembang khususnya pada sub pusat pelayanan kota di luar kawasan pusat kota;
  - c) Kegiatan perdagangan skala besar (grosir) jenis kelontong, *garment*, elektronik dan barang perlengkapan sehari-hari dilayani di sekitar pusat kota yaitu di sekitar Pasar Besar, Pecinan, dan Kiduldalem;
  - d) Perdagangan alat-alat mobil yang berkembang sepanjang Jl. Gatot Subroto, Jl. Laksamana Martadinata sampai ke Jl. Kolonel Sugiono tetap dipertahankan keberadaannya.
- 4) Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a) Pembatasan toko modern yang didirikan di kawasan perumahan;
  - b) Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan di Jl. Kawi, Jl. MT. Haryono, Jl. Ikhwan Ridwan Rais, kawasan Klojen, kawasan Bunul, kawasan Blimbing, Jl. S. Supriadi, Jl. Laksamana Martadinata, dan Jl. Slamet Riadi.
- 5) Pembatasan perdagangan sektor informal dengan skala kecil yang mempunyai ciri khusus dan dalam jumlah yang besar, tetap menggunakan lokasi yang ada antara lain Pasar Burung, Pasar Ikan dan Pasar Bunga, di Splendid.

- 6) Pada kawasan pusat kota dikembangkan gedung parkir yang dikelola Pemerintah Daerah, swasta atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta.
  - 7) Pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket yaitu:
    - a) Pusat perdagangan di Gunung Buring dan Mulyorejo;
    - b) Pertokoan diarahkan berdekatan dengan fasilitas umum;
    - c) Toko dan warung yang sifatnya eceran dan barang dagangannya merupakan bahan kebutuhan sehari-hari diarahkan pengembangannya menjadi satu dengan kawasan atau lingkungan permukiman; dan
    - d) Pengembangan *Malang Trade Centre* diarahkan pada sub wilayah Kota Malang Utara yaitu di antara Mojolangu dan Tunjungsekar atau kawasan LIK dan Jl. Sukarno Hatta ke arah utara sampai Tasikmadu – Karangploso.
- c. Kawasan perkantoran;
- 1) Kantor Pemerintah Kota Malang yang terletak di Jl. Tugu, keberadaannya tetap dipertahankan dan tidak diadakan alih fungsi ataupun perubahan dalam bentuk penampilan bangunan.
  - 2) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perkantoran swasta yang saat ini berada di sekitar Jalan Tugu perlu dikembangkan ke wilayah Kedungkandang dan lokasi yang ada saat ini tetap akan digunakan untuk kawasan perkantoran dengan intensitas kegiatan yang sedang dengan ruang terbuka hijau dan tempat parkir yang cukup memadai.
  - 3) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berada di sekitar Arjosari mulai Jl. Raden Intan ke arah Selatan dan di sepanjang Jl. Ahmad Yani, di sekitar Sawojajar antara lain Kantor PDAM, Kantor BPN, Kantor Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum, tetap dipertahankan keberadaannya serta ditingkatkan lagi kondisinya.
  - 4) Pengembangan kawasan perkantoran baru selain perkantoran yang sudah ada di Jl. Tugu dan kawasan perkantoran yang di sekitar Kelurahan Arjosari, direncanakan di sekitar Kelurahan Sawojajar sebagai lokasi kawasan perkantoran yang baru.
  - 5) Perkantoran Pemerintah dengan skala pusat pelayanan kota diarahkan di Kelurahan Arjowinangun.
- d. Kawasan Industri dan Pergudangan;
- 1) Rencana Pengembangan kompleks industri dan pergudangan terdapat 5 (lima) lokasi yaitu:
    - a) Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Tenaga;

- b) Kawasan Industri dan pergudangan di Bandulan;
  - c) Kawasan Industri dan pergudangan di Ciptomulyo; dan
  - d) Kawasan Industri keramik di sepanjang Jl. Majyen Panjaitan dan Jl. Mayjend Haryono.
  - e) Kawasan industri dan pergudangan di Arjowinangun.
- 2) Pembatasan pengembangan kawasan komplek industri dan pergudangan di sekitar Jl. Tenaga, Jl. Bandulan Barat, dan di Jl. Kolonel Sugiono.
- e. Kawasan pariwisata;
- Kawasan obyek wisata yang diprioritaskan dikembangkan antara lain: Stadion Gajayana; Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang; Taman Rekreasi Tlogomas Permai; Sentra Industri Keramik Dinoyo; Kawasan Alun-alun Merdeka Malang; Hutan Kota Malabar; Kompleks Perguruan Tinggi; Taman Rekreasi Kota Malang; Sentra Industri Tempe Sanan; Pasar Besar Malang; dan Kawasan Alun-Alun Tugu.
- f. Ruang evakuasi bencana;
- 1) Penetapan ruang evakuasi bencana diarahkan pada kawasan sebagai berikut:
- a) Pemanfaatan daerah/kawasan yang berada di sekitar lokasi rawan bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana.
  - b) Pemanfaatan ruang evakuasi bencana di Buring dapat dilakukan di Kantor Pemerintahan dengan memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana seperti balai RW dan kantor kelurahan.
  - c) Memanfaatkan ruang terbuka dalam bentuk lapangan olahraga sebagai tempat evakuasi bencana, seperti Lapangan Rampal.
  - d) Jalur evakuasi bencana yang telah ditetapkan di Buring dapat diakses dengan mudah dalam melakukan evakuasi terhadap bencana yang terjadi.
  - e) Pencapaian ke lokasi evakuasi bencana dari lokasi bencana di Kota Malang dapat melalui jalan utama di Kecamatan Kedungkandang yaitu Jl. Madyopuro, Jl. Ki Ageng Gribig, Jl. Muharto dan Jl. Mayjend Sungkono yang menghubungkan lokasi rawan bencana di Kelurahan Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, dan Kotalama menuju lokasi evakuasi bencana.
- g. Ruang bagi kegiatan sektor informal;
- 1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sektor informal meliputi:
- a) Mengarahkan pedagang makanan ke Pasar Besar, Pasar Tugu, Pulosari Jl. Gajayana dan di sekitar Taman Krida Budaya;
  - b) Mengarahkan pedagang jenis buku ke Jl. Wilis;
  - c) Mengarahkan pedagang onderdil sepeda dan motor ke wilayah Comboran;

- d) Mengarahkan pedagang kredit mikro, fasilitas, dan bantuan teknis;
  - e) Menciptakan kerjasama antara ekonomi informal dengan pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta.
- 2) Pengaturan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan sebagai berikut:
- a) Lokasi PKL diarahkan pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan selain di pusat kota yaitu di Mulyorejo, Dinoyo, Buring, dan Blimbing dengan memberikan tempat khusus;
  - b) Pengembangan areal khusus untuk PKL dengan bangunan permanen yang terdiri dari beberapa stand/los untuk tiap jenis dagangan PKL diarahkan di belakang Industri Gadang (areal Pasar Induk Gadang sebelah selatan) ;
  - c) Pengembangan PKL di sekitar koridor jalan-jalan utama Daerah (jenis jalan arteri dan kolektor) diarahkan hanya di satu sisi jalan, dan satu sisi jalan lainnya digunakan untuk parkir;
  - d) Keberadaan PKL di kawasan pusat kota ditertibkan dan direlokasi ke Jl. Sriwijaya, Jl. Sutan Syahrir, Jl. Kyai Tamin dan Jl. Ronggolawe;
  - e) Beberapa kawasan yang termasuk jalur hijau antara lain Alun-alun atau Jl. Merdeka dan sekitarnya, jalur hijau di tengah jalan kembar Perumahan Sukun Permai, di sekitar Jl. Mahakam, lokasi disekitar rel kereta api, tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi PKL;
  - f) Pengembangan kawasan pedagang kaki lima dapat dilakukan pada tanah-tanah sebagai berikut:
    - (1) Di sekitar lokasi Kelurahan Lesanpuro dengan adanya perkembangan permukiman sekitar Sawojajar dan Gunung Buring; dan
    - (2) PKL buku dikembangkan pada lokasi yang dekat dengan tempat pendidikan antara lain perguruan tinggi dengan lokasi di belakang Pasar Dinoyo.
  - g) Areal bekas stasiun kereta api di Jagalan, sekitar Pulosari dengan memanfaatkan tanah bekas rel lori angkutan tebu;
  - h. Kawasan peruntukan lain, yang meliputi:
    - 1. Kawasan pelayanan umum pendidikan;
    - 2. Kawasan pelayanan umum kesehatan;
    - 3. Kawasan pelayanan umum peribadatan;
    - 4. Kawasan pelayanan umum rekreasi dan olah raga.

Kawasan strategis berfungsi sebagai kawasan pelayanan kota dengan skala pelayanan kota, regional dan nasional yang berpengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

#### 1. Kawasan Strategis Ekonomi;

Lokasi kawasan strategis ekonomi ditetapkan pada kawasan perdagangan yang berpusat di sekitar Pasar Besar Kota Malang, dan kawasan sentra industri yang terdiri dari sentra industri keripik di Sanan, sentra mebel di Tunjungsekar, sentra saniter di Karang besuki, sentra kerajinan rotan di Arjosari dan sentra industri kerajinan keramik di Dinoyo.

2. Kawasan Strategis Sosial budaya.

- a. Kawasan Kayutangan yang terdiri dari kompleks pertokoan di sepanjang koridor *Kajoetangan straat*, dan pertokoan di perempatan *Kajoetanganstraat- Semeroestraat*;
- b. Kawasan Bundaran Tugu yang terdiri dari Stasiun Kereta Api Malang, Gedung HBS/AMS di JP. COEN PLEIN (Alun-alun Bunder), dan Balai Kota Malang;
- c. Koridor Jl. Semeru – Jl. Besar Ijen yang terdiri dari Gedung Sekolah Menengah Kristen (*Christ MULO School*) dan Komplek Stadion Gajayana.

Sedangkan Struktur pelayanan Kota Malang yang direncanakan hingga tahun 2030 sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Kota Malang yaitu Pusat kota dan Pusat Pelayanan Kota ini didalam pengembangan Kota Malang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional, yakni pada Kawasan Alun-alun dan sekitarnya, dengan fungsi:
  1. Pelayanan primer: pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan, dan peribadatan;
  2. Pelayanan sekunder: pendidikan, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, perumahan, dan ruang terbuka hijau.
- b. Sub pusat pelayanan kota terdiri dari:
  1. Sub pusat pelayanan kota yang berada di kawasan pasar Dinoyo dan sekitarnya serta Taman Krida Budaya dan sekitarnya, melayani sub wilayah kota Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi:
    - a) Pelayanan primer: pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya;
    - b) Pelayanan sekunder: perumahan, perkantoran, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau.
  2. Sub pusat pelayanan kota yang berada di Kawasan Pasar Blimbing dan sekitarnya, Jl. Laksamana Adi Sucipto dan sekitarnya, Kawasan Perumahan Pondok Blimbing Indah dan sekitarnya; serta Terminal Arjosari dan sekitarnya, melayani Sub wilayah kota Malang Timur Laut, meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Blimbing, dengan fungsi:
    - a) Pelayanan primer: pelayanan terminal, industri besar, menengah, dan kecil, perdagangan dan jasa, pendidikan dan sarana olah raga;
    - b) Pelayanan sekunder: permukiman, sarana olahraga, perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau;

3. Sub pusat pelayanan kota yang berada di kawasan Perumahan Sawojajar, Vellodrom dan sekitarnya, serta Perumahan Buring dan sekitarnya, melayani Sub Wilayah Kota Malang Timur, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang dan sebagian wilayah Kecamatan Blimbing, dengan fungsi:
  - a) Pelayanan primer: perkantoran, sarana olahraga, industri, dan perumahan;
  - b) Pelayanan sekunder: perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau;
4. Sub Pusat Pelayanan Kota berada di Pasar Gadang dan sekitarnya, kawasan Jl. Mayjen Sungkono dan sekitarnya, serta Jl. Satsuit Tubun – Gadang – Bumiayu dan sekitarnya, melayani Sub wilayah kota Malang Tenggara, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi:
  - a) Pelayanan primer: perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan;
  - b) Pelayanan sekunder: perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau;
5. Sub Pusat Pelayanan Kota berada di kawasan Jl. Dieng – Terusan Dieng dan sekitarnya, melayani Sub wilayah kota Malang Barat, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun, dengan fungsi:
  - a) Pelayanan primer: industri, fasilitas umum, dan perumahan;
  - b) Pelayanan sekunder: pendidikan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana olah raga, dan ruang terbuka hijau;
- c. Pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota dikembangkan pada masing-masing kelurahan di tiap sub wilayah kota.

#### **II.4. POSISI KOTA MALANG DALAM KONSTELASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, secara geografis terletak pada posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang. Kondisi iklim Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Jarak antara Kota Malang dengan Kota Surabaya sekitar 90 kilometer. Dengan demikian Kota Malang secara geografis mudah dijangkau dari seluruh wilayah di Jawa Timur, nyaman untuk dijadikan tempat tinggal dan sangat kondusif untuk dijadikan sebagai tujuan menanamkan investasi.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Malang dibandingkan dengan PDRB per kapita Jawa Timur atas dasar harga konstan dari tahun 2004 – 2009 tertera pada tabel berikut.

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jawa Timur	242.228.892	256.374.727	271.249.317	287.814.184	304.798.966	320.210.547,78
Kota Malang	9.576.648,55	10.117.904,96	10.739.067,46	11.380.769,63	12.118.269,47	12.712.117,88

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Malang terus mengalami peningkatan dan pada setiap tahun PDRB per kapita Kota Malang masih diatas PDRB per kapita Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa penduduk Kota Malang lebih produktif dibandingkan dengan rata – rata penduduk Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 2004 – 2009 tertera pada tabel berikut

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jawa Timur	5,82	5,69	5,8	6,05	5,90	5,01
Kota Malang	5,86	5,65	5,95	5,98	6,02	4,90

Laju inflasi Kota Malang dibandingkan dengan Laju inflasi Jawa Timur dari tahun 2004 – 2009 tertera pada tabel berikut

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jawa Timur	7,21	11,75	10,27	7,12	9,73	3,62
Kota Malang	6,28	15,74	5,92	5,93	10,49	3,39

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang dibandingkan dengan IPM Jawa Timur dari tahun 2004 – 2009 tertera pada tabel berikut

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jawa Timur	64,49	66,84	66,87	68,06	70,38	70,98
Kota Malang	69,13	69,96	75,34	75,72	76,25	76,58

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografi, sosial-budaya, ekonomi, dan politis. Pemahaman akan potensi dan permasalahan kondisi umum daerah menjadi penting untuk membuat analisis dan prediksi perencanaan strategis dalam rangka menyusun rencana jangka panjang daerah.

Masalah dan isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Malang ke depan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Timur serta permasalahan lokal yang selama ini muncul. Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Kota Malang, sebagai berikut :

#### **III.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup**

##### **III.1.1. Input :**

###### **Permasalahan :**

1. Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang dialami kota Malang berasal dari dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam adalah kondisi geografis yang secara inheren dimiliki suatu daerah yang apabila terjadi bencana manusia sebagai penghuninya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan, seperti misalnya masalah banjir. Secara topografi wilayah Kota Malang merupakan daerah dataran tinggi. Wilayah ini terletak pada ketinggian 380 - 667 meter dari permukaan laut dan dikelilingi oleh wilayah pegunungan antara lain Gunung Anjasmoro (2,277 m) dan Gunung Arjuno (3,399 m) di bagian Utara, Pegunungan Kapur (650 m) di bagian Selatan, Gunung Kawi (2,625 m) Gunung Kelud (1,731 m) di bagian Barat serta Gunung Bromo (2,392 m) dan Gunung Semeru (3,676 m) di bagian Timur.
2. Kondisi geologi Kota Malang secara umum dapat dibedakan menjadi dua daerah pokok yaitu daerah *alluvium* dan daerah hasil gunung api kwarter muda. Sebagian besar (59 %) dari luas kota Malang merupakan daerah *alluvium* yang berada di Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun, dan 41 % merupakan daerah hasil gunung api kwarter muda yang berada di Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan tanah di kota Malang terdiri atas 4 jenis tanah yaitu: (1) Jenis tanah *alluvial* kelabu kehitaman yang terdapat di Kecamatan

Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen; (2) Jenis tanah mediteran coklat yang terdapat di Kecamatan Kedungkandang; (3) Jenis tanah asosiasi andosol coklat dan grey humus terdapat di kecamatan Sukun, dan sebagian kecil di Kecamatan Klojen; dan (4) Jenis tanah asosiasi latosol coklat kemerahan dan grey coklat yang terdapat di Kecamatan Lowokwaru.

3. Kota Malang dilintasi oleh Sungai Brantas dengan beberapa anak sungainya yaitu Sungai Bango, Sungai Amprong, Sungai Sukun, dan Sungai Metro. Sungai-sungai tersebut juga berfungsi sebagai drainase kota sehingga pada dasarnya dapat membebaskan Kota Malang dari ancaman banjir. Secara garis besar Kota Malang dibagi menjadi tiga bagian besar daerah tangkapan hujan yaitu : (1) Wilayah tangkapan air hujan Malang Utara terdiri dari Daerah Aliran Sungai Bango, dan Sungai Amprong; (2) Wilayah tangkapan air hujan Malang Barat merupakan Daerah Aliran Sungai Brantas; (3) Wilayah tangkapan air hujan Malang Selatan terdiri dari Daerah Aliran Sungai Brantas bagian Selatan, Sungai Metro, Sungai Sukun dan Sungai Amprong.
4. Permasalahan kualitas air sungai yang semakin menurun, serta berkembangnya lingkungan kumuh di sepanjang DAS, pembuangan limbah baik domestik maupun industri ke sungai menjadi kendala yang serius dalam upaya untuk memanfaatkan air sungai sebagai air baku untuk keperluan pasokan air bersih. Walaupun demikian, upaya kearah normalisasi kualitas air sungai harus mendapatkan perhatian serius. Sosialisasi kebersihan dan sanitasi lingkungan menjadi permasalahan yang cukup serius.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa proses pembangunan dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang memberikan perhatian pada prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Sejalan dengan hak-hak warga Indonesia atas lingkungan hidup disatu pihak dan adanya kesadaran masyarakat di lain pihak. Hak atas lingkungan hidup dalam konteks bersih dan sehat. Pembangunan berwawasan lingkungan di kota Malang dapat dilakukan dengan memberikan diseminasi dan sosialisasi informasi peringatan dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; (2) Partisipasi masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga publik dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; (3) Penegakan hukum di bidang lingkungan yang konsisten.
7. Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, pendirian rumah hunian di sepanjang daerah aliran sungai, dan pendirian bangunan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan.
8. Peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Malang sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung berpengaruh pada meningkatnya polusi udara di Kota Malang. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan bersih di Kota Malang juga diperparah dengan berkurangnya pepohonan akibat dari penggunaan lahan untuk berbagai kebutuhan manusia. Selain itu, berkurangnya pepohonan di daerah penyangga di luar kewenangan Kota Malang akibat pengalihan lahan untuk perumahan dan industri juga turut memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di Kota Malang.

#### **Capaian Keberhasilan :**

1. Keberhasilan yang dicapai oleh Kota Malang dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini, antara lain dengan diperolehnya Piala Adipura dan penghargaan di bidang transportasi yaitu Wahana Tata Nugraha. Disamping itu juga meningkatnya perluasan taman dan hutan kota yang menjadi semakin asri dan indah sehingga dapat meningkatkan kualitas udara kota. Tersosialisasikannya kualitas lingkungan yang baik akan berdampak pada semakin meningkatnya kesadaran dan disiplin warga kota dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya serta

meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.

2. Telah tumbuhnya partisipasi warga Kota Malang akan pentingnya menanam dan merawat tanaman baik di dalam lingkungan rumah, sekolah, kantor maupun di sekitar tempat tinggalnya. Tumbuhnya kesadaran ini merupakan salah satu keberhasilan program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang telah memasuki tahun ke tujuh. Sosialisasi dan pengembangan program ini dapat terus ditingkatkan dengan sasaran program pada taman-taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada, serta kawasan sepanjang DAS. Peningkatan partisipasi *stakeholdres* (masyarakat) secara kongkrit harus terus diupayakan dengan pelibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan bahkan sampai dengan perawatannya.
3. Produk-produk penataan ruang (RTRW, RDTR, dan lain-lain), serta produk Peraturan Daerah mengenai pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagian telah dimiliki dan sebagian ang lain dalam proses penyusunan.

### **III.1.2. Analisis :**

Proyeksi peluang, ancaman, permasalahan dan keberhasilan dalam waktu 20 tahun mendatang :

#### **Proyeksi Peluang :**

1. Kondisi geomorfologis, letak geografis dan topografi, keadaan tanah Kota Malang yang subur dan iklim yang sejuk, didukung oleh panorama sekitar Kota Malang yang indah merupakan peluang yang sangat positif bagi upaya untuk menciptakan suatu lingkungan kota yang asri, sejuk, yang didukung oleh kekayaan keanekaragaman hayati, sangat menunjang untuk terciptanya Kota Malang sebagai Kota Bunga. Dalam waktu 20 tahun yang akan datang, dengan semakin sadarnya masyarakat akan kelestarian lingkungan, diharapkan Kota Malang memiliki peluang untuk dapat menjadi kota bersih, indah, dan nyaman.
2. Potensi alam dengan kegiatan pertanian yang berada di luar batas wilayah Kota Malang merupakan potensi yang dapat ikut mendukung dan meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata khususnya wisata agro, sehingga pengembangan aktivitas pendukung

pariwisata dan perekonomian berbasis hasil-hasil pertanian memiliki peluang besar untuk pengembangan dalam kurun 20 tahun ke depan.

3. Kota Malang memiliki keindahan alam dan udara pegunungan yang sejuk berpotensi untuk pengembangan wisata, yang diharapkan akan mampu menarik kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan wisata itu antara lain dengan membuat kawasan terintegrasi dimana beberapa fasilitas kepariwisataan dibangun untuk mendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata juga pengembangan jalur koridor wisata serta fasilitas pendukung kepariwisataan yang dapat meningkatkan daya tarik dan lama tinggal wisatawan.

#### **Proyeksi Ancaman:**

1. Kota Malang terletak di lingkungan Gunung, dan dilintasi oleh 5 sungai secara alamiah memiliki ancaman terjadinya bencana longsor dan banjir yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Tingginya kebutuhan ruang hidup yang dihadapkan pada ketersediaan lahan menjadi semakin berkurang, mengakibatkan munculnya pemukiman liar di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal. Oleh karena itu perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin terhadap munculnya rumah-rumah penduduk yang berada di bantaran sungai dengan penegakan peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut serta penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah ada.
2. Tidak terkendalinya perkembangan kawasan kumuh disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pencemaran sungai, menyebabkan kualitas lingkungan sepanjang DAS akan semakin menurun. Kualitas air tanah menjadi sangat buruk, pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota.
3. Bencana alam sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam, isu pemanasan global, permasalahan bencana alam, dan berbagai permasalahan lain yang terkait dengan *space of life* merupakan isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan.

**Proyeksi Permasalahan :**

1. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai yang terletak di luar wilayah Kota Malang akan berdampak bencana banjir kiriman di wilayah Kota Malang. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pencegahan terhadap terganggunya keseimbangan alam yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah Kota Malang.
2. Tanpa pengendalian eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan kota, daya dukung lingkungan cenderung mengalami penurunan dan ketersediaan SDA akan semakin menipis. Kondisi ini menjadi lebih buruk apabila tidak diikuti dengan pembenahan pranata pembangunan kota (rencana dan rancangan tata ruang kota) sampai kepada perancangan detail pada kawasan-kawasan khusus, seperti kawasan di sepanjang DAS.
3. Semakin pesatnya aktivitas pembangunan di Kota Malang berpotensi besar terhadap terjadinya penurunan daya dukung tanah seperti pencemaran air, udara dan tanah. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA, sangat diperlukan untuk mendorong perilaku masyarakat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dalam 20 tahun mendatang Kota Malang tidak mengalami krisis lingkungan hidup.
4. Masih lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan air, serta semakin berkurangnya ruang terbuka hijau kota, harus diantisipasi serta mendapatkan prioritas untuk menghindari ketidakseimbangan ekologis, melalui penyusunan pranata (ketentuan peraturan perundang-undangan) yang berpihak kepada pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

**Proyeksi Keberhasilan :**

1. Kota Malang pada 20 tahun ke depan diproyeksikan untuk menjadi kota yang bersih, indah, dan nyaman dengan indikator lingkungan yang sehat dan kualitas visual alam yang asri. Kondisi ini ditandai dengan semakin rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, udara di bawah ambang batas yang ditetapkan, semakin luasnya wilayah ruang terbuka

hijau kota, serta makin beragamnya vegetasi maupun fauna yang hidup bebas di alam kota Malang.

2. Pembangunan fisik Kota Malang melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan telah dipandu dengan perangkat perencanaan kota yang secara substantif mampu menjamin kelestarian lingkungan. Aktor pembangun (*stakeholders*) beserta perangkat pemerintah daerah secara sadar dan konsisten secara bersama-sama menjalankan peraturan penataan ruang kota akan menjamin terciptanya kelestarian lingkungan.
3. Meningkatnya tingkat kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks kualitas hidup masyarakat kota Malang.
4. Terwujudnya secara nyata perilaku budaya hidup bersih, sehat, tertib dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Terwujudnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
6. Terwujudnya lingkungan sepanjang DAS yang melintas Kota Malang yang asri dengan dominasi fungsi RTH yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman untuk tujuan penganeekaragaman hayati, budidaya, maupun kelestarian lingkungan dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik, yang nyaman dan aman bagi komunitas Kota Malang.
7. Melalui peranserta masyarakat yang didukung kesadaran semua *stakeholders* dalam membangun Kota Malang, maka penyediaan RTH sebesar 30% seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dipenuhi.
8. Tersedianya fasilitas sanitasi kota yang ramah lingkungan dan sistem pengelolaan limbah kota yang alami dan mampu menunjang kelestarian lingkungan.



### **III.1.3. Output :**

Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup:

1. Peningkatan jumlah penduduk Kota Malang dan sekitarnya dalam jangka waktu 20 tahun ke depan akan berimplikasi pada peningkatan pengurangan luas lahan pertanian dan RTH sebagai akibat pemenuhan akan kebutuhan perumahan.
2. Perubahan fungsi lahan kota di wilayah Timur Kota Malang khususnya di kecamatan Kedungkandang, akan menyebabkan terjadinya pergeseran tata ruang kota yang berpengaruh pada ekosistem dan kehidupan organisme. Akibat semakin menyempitnya ruang kota, maka keanekaragaman hayati akan menurun jumlahnya karena beberapa spesies hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan lagi. Hal ini disamping memberikan manfaat juga dapat menimbulkan residu pencemaran yang berefek negatif bagi manusia seperti mutasi genetik dan menyebabkan perubahan secara signifikan namun pasti terhadap struktur fisik dan sistem dalam tubuh makhluk hidup.
3. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas. Hal itu akan memicu terjadinya pemanasan global yang berdampak pada perubahan musim, cuaca, dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan harus tetap berprinsip pada pembangunan berwawasan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

## **III.2. Demografi**

### **III.2.1. Input :**

#### **Permasalahan :**

1. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, apabila tidak ada pengendalian, dapat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kota Malang akan semakin tinggi. Apalagi Kota Malang merupakan Kota Pendidikan yang banyak dijadikan sebagai lokasi belajar bagi masyarakat dari luar Kota Malang.
2. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dimana pada Tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Malang sebesar 26.732 rumahtangga atau 93.635 jiwa. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk dapat menekan jumlah penduduk miskin tersebut.

3. Dalam 20 tahun mendatang Kota Malang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, jumlah penduduk yang semakin banyak, dan dinamika masyarakat yang semakin beraneka ragam.

#### **Capaian Keberhasilan :**

1. Angka pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,80% dalam 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan dari sisi kesehatan Kota Malang berhasil menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kondisi kesehatan masyarakat Kota Malang dapat dikatakan relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional.
2. Dibangunnya pusat-pusat pendidikan bertaraf internasional di wilayah Kota Malang, dengan harapan dimasa yang akan datang dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
3. Peningkatan investasi dengan orientasi penyerapan tenaga kerja dengan harapan mengurangi angka pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

#### **III.2.2. Analisis :**

##### **Proyeksi Peluang :**

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Malang berpeluang untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk sebesar nol persen (*zero growth*). Peningkatan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan usia harapan hidup penduduk di atas 75 tahun, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
2. Jumlah pengangguran dapat ditekan melalui peningkatan investasi yang berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja, penggerakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian stimulan serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Peningkatan taraf ekonomi dan taraf hidup masyarakat diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Malang yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat berpeluang untuk mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing kuat yang mampu menerima tantangan

terhadap kemajuan dan perubahan global, sehingga dapat keluar dari tekanan ekonomi dan dapat menciptakan inovasi yang berdampak positif sebagai upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

**Proyeksi Ancaman :**

1. Berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilakukan, namun demikian jumlah PMKS tidak semakin berkurang.
2. Masalah kemiskinan di kota Malang masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun jumlah kemiskinan sudah dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Masalah kemiskinan ini bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin.
3. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Kota Malang menghadapi masalah kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Derajat kesehatan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai indikator yang berkaitan satu sama lain. Demikian juga dengan pendidikan, walaupun telah ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitas namun dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi menyebabkan tidak dapat menyentuh segala lapisan masyarakat yang berakibat tetap besarnya kesenjangan sosial dan kemiskinan serta kebijakan di bidang ekonomi yang berakibat terhadap semakin tidak terselesaikannya masalah tersebut.

**Proyeksi Permasalahan :**

1. Masalah yang akan dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terkait dengan masalah demografi adalah semakin banyaknya penduduk usia produktif (15 — 64 tahun), yang implikasinya memerlukan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Tidak teratasinya jumlah pengangguran berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Peningkatan jumlah penduduk pendatang sebagai dampak keberhasilan pembangunan akan membawa permasalahan sosial-budaya yang harus diantisipasi terhadap kerawanan-kerawanan sosial yang selalu menyertai berkembangnya kota menjadi kota metropolitan.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat sebagai akibat dari semakin padatnya lingkungan belum sepenuhnya disadari dan dipahami sebagai bagian terpenting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada tingginya biaya kesehatan berdampak pada kualitas hidup manusia.
4. Terhadap biaya pendidikan yang tinggi berdampak pada tidak menyentuhnya pendidikan pada segala kalangan yang mengakibatkan semakin tidak terpecahkannya masalah pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta daya saing global.

**Proyeksi Keberhasilan :**

Keberhasilan bidang demografi yang hendak dicapai Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya usia harapan hidup di atas 75 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, mengingat ketersediaan fasilitas medis yang memadai dan juga tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan juga semakin baik;
3. Terkendalinya tingkat urbanisasi di Kota Malang;
4. Penghargaan untuk pembinaan program Bina Keluarga Balita terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur;
5. Penghargaan untuk pembinaan program Bina Keluarga Balita terbaik Tingkat Nasional.

**III.2.3. Output :**

Prediksi kondisi demografi Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan :

1. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, karena pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi;

2. Komposisi penduduk yang semakin heterogen, karena dampak globalisasi yang mana terjadi arus migrasi antara daerah dan antar negara.

### **III.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

#### **III.3.1. Input :**

##### **Permasalahan :**

1. Kelemahan mendasar dalam perekonomian Kota Malang yaitu belum adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi. Struktur perekonomian kota akan sulit berkembang ketika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi disamping meruntuhkan fondasi perekonomian nasional juga berpengaruh besar pada kondisi perekonomian di daerah, tidak terkecuali Kota Malang.
2. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan serta belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku usaha swasta.
3. Masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku ekonomi baik Pemerintah kota Malang, swasta, dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk unggulan kota Malang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing dan kualitas produk-produk unggulan Kota Malang.
5. Rendahnya kapasitas UMKM dalam menghadapi persaingan global. Daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain rendahnya akses informasi pasar, dan rendahnya daya saing terhadap produk-produk pabrikan/manufaktur. Oleh karena itu sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mengembangkan peran dan potensi UMKM.

### **Capaian Keberhasilan :**

1. Adanya berbagai upaya penanganan krisis dan didukung oleh penerapan otonomi daerah yang lebih luas memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, berdampak pada membaiknya kondisi perekonomian Kota Malang. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu nilai pertumbuhan ekonomi telah meningkat dan semakin membaiknya iklim usaha bagi UMKM dan koperasi.
2. Meningkatnya jumlah unit usaha industri kecil, menengah, dan besar serta meningkatnya jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, menunjukkan bahwa Kota Malang cukup kondusif untuk pengembangan dunia usaha.
3. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dimana pada Tahun 2004 PAD Kota Malang sebesar Rp. 50 milyar dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 92,77 milyar. Tingkat PDRB Kota Malang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana pada Tahun 2004 sebesar Rp. 9,576 triliun, Tahun 2009 Rp. 12,712 triliun dan untuk Tahun 2006 diproyeksikan mencapai Rp.12,54 triliun.
4. Adanya pembinaan kepada UKM dalam bentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang tersebar di 5 wilayah kecamatan di kota Malang.
5. Pembentukan sentra-sentra UKM seperti sentra makanan tempe di Kelurahan Purwantoro, serta pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi bisnis sentra UKM.

### **III.3.2. Analisis**

#### **Proyeksi Peluang :**

1. Lokasi Kota Malang sebagai salah satu titik pusat kegiatan di kawasan sekitarnya utamanya kawasan pusat Satuan Pengembangan Wilayah (SWP) Jawa Timur bagian Selatan menjadikan Kota Malang mempunyai posisi yang sangat strategis berkaitan dengan aspek lokasi. Perkembangan Kota Malang ke depan cenderung meningkat pesat dengan munculnya pusat-pusat usaha perdagangan dan jasa. Saat ini perkembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa (*Central Business District/CDB*) masih terarah pada kawasan pusat kota (Klojen) dan beberapa kawasan strategis lainnya. Sehingga untuk mengarahkan penyebaran *CBD* baru perlu diarahkan

pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang dapat mendorong berkembangnya kawasan-kawasan yang relatif kurang berkembang. Tidak menutup kemungkinan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan/atau Pemerintah Kota Batu untuk membentuk suatu kawasan ekonomi.

2. Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Malang relatif terkendali dan tidak adanya gejolak dan konflik menjadikan Kota Malang sebagai kota teraman untuk investasi di Jawa Timur.
3. Diberlakukannya pasar bebas (WTO) pada Tahun 2015 bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional, nasional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

**Proyeksi Ancaman :**

1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi memerlukan peran Pemerintah Kota Malang dalam jangka panjang yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Kota Malang “mengendalikan” perekonomian agar tercipta keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas Kota Malang dan tersedianya dana untuk investasi sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. Perekonomian Kota Malang bisa mengalami guncangan terkait dengan faktor eksternal berupa munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak kurang menguntungkan pada kondisi perekonomian masyarakat.
3. Globalisasi dan pasar bebas yang akan efektif terjadi Tahun 2015, di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas, maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang dalam hal ini akan merugikan ekonomi daerah.

**Proyeksi Permasalahan :**

1. Persaingan akan semakin tajam, sementara itu daya saing produk lokal masih belum kuat. Sektor ekonomi riil masih didominasi oleh sektor informal sehingga untuk peningkatan kapasitasnya masih menghadapi kendala teknis dan pendanaan.

2. SDA yang ada sangat terbatas dan semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi yang berdampak negatif pada perekonomian daerah.

**Proyeksi Keberhasilan :**

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Kota Malang memproyeksikan perbaikan kondisi perekonomian daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5-7% per tahun secara berkesinambungan dan laju inflasi berada pada kisaran 3-6% per tahun.
2. Membaiknya iklim usaha baik industri kecil, industri menengah dan industri besar. Hal ini ditandai dengan terjadinya mobilisasi vertikal usaha yang harmonis antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
3. Meningkatnya nilai investasi di daerah yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
5. Terwujudnya prinsip demokrasi ekonomi di Kota Malang yang menjamin adanya keadilan ekonomi masyarakat sehingga terdapat jaminan kesempatan berusaha dan bekerja.
6. Terwujudnya UMKM dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi utama daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing tinggi dan berkualitas.

**III.3.3. Output :**

Prediksi kondisi ekonomi dan sumber daya alam dalam kurun waktu 20 tahun ke depan :

1. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatnya investasi, terciptanya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan pekerja.
2. Terwujudnya Kota Malang yang benar-benar dapat menjadi pusat industri, perdagangan dan jasa.
3. Terciptanya pembangunan yang selaras antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas kota dan pertumbuhan ekonomi.



4. Pelaksanaan pembangunan yang tersinergi dengan daerah sekitarnya seperti fasilitas umum, transportasi, sehingga beban Pemerintah Kota Malang dalam penyediaan prasarana dapat berkurang.

### **III.4. Sosial Budaya dan Politik**

#### **III.4.1. Input :**

##### **Permasalahan :**

1. Degradasi nilai moral, sosial dan budaya terus terjadi di masyarakat. Masuknya budaya asing akibat globalisasi, terutama budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai budaya masyarakat setempat, tidak sepenuhnya dapat dicegah dan dikendalikan. Hal tersebut mengakibatkan luntuhnya religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat, ikatan sosial semakin merenggang, serta masyarakat semakin bersikap permisif atau acuh tak acuh terhadap pelanggaran nilai-nilai agama, moral dan budaya.
2. Penurunan moral, meningkatnya kriminalitas, berkembangnya tindak kekerasan dan semakin tingginya persaingan yang cenderung menjadi tidak sehat dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan cerdas. Salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan Napza yang pada saat ini menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan.
3. Masih kurangnya pengamalan norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, disiplin, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk budaya lokal, dan cenderung untuk memilih budaya modern yang instan, lambat laun akan berdampak tereliminasi budaya daerah.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan kepatuhan serta ketaatan kepada hukum. Kesadaran masyarakat yang mengedepankan koridor kehidupan berpolitik dan hukum, patuh dan taat hukum dalam setiap gerak kehidupannya masih belum tinggi termasuk dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus

keberhasilan pembangunan ke depan.

**Capaian Keberhasilan :**

1. Terbinanya kerukunan antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan. Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Kota Malang sudah sangat harmonis. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadatan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat berjalan baik. Secara kualitas, kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat religiusitas masyarakat tetap terjaga, kerukunan antar umat beragama juga sangat baik, tercermin dari tidak adanya kejadian konflik yang berlatar belakang agama. Kota Malang merupakan pusat dari berbagai kegiatan agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu dan penghayat aliran kepercayaan, namun kondisi daerah tetap aman dan terkendali. Tidak adanya konflik dalam menjalankan aktivitas keagamaan tidak terlepas dari para tokoh dan pemuka agama untuk bersatu padu membina kerukunan antar umat beragama yang terakumulasi dalam forum-forum keagamaan seperti Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (PAUB), Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum-forum lainnya yang secara rutin mengadakan koordinasi dan pertemuan untuk tetap terbinanya kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing masing pemeluknya.
2. Stabilitas keamanan dan ketertiban yang relatif baik dan terjaga. Tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang berbau SARA dan yang menimbulkan kerusuhan massal berkepanjangan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Kota Malang yang relatif baik, kehidupan beragama yang cukup religius, adanya toleransi dan kerukunan yang relatif tinggi, semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang masih terjaga. Tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif tidak begitu ketat menjadikan masyarakat Kota Malang relatif dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dan potensi konflik yang berkembang di masyarakat. Tindak kriminalitas dan tingkat kejahatan relatif rendah.
3. Keberhasilan penting yang telah diraih dalam kehidupan sosial politik yaitu suksesnya pemilihan umum Kepala Daerah/Walikota, pemilihan umum

anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Malang, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang berlangsung secara aman dan demokratis pada Tahun 2008 dan Tahun 2009.

#### **III.4.2. Analisis :**

##### **Proyeksi Peluang :**

Kota Malang dalam sejarah bangsa Indonesia sudah terkenal dengan kemashyuran dan kearifan Raja Kertanegara, karya-karya pujangga yang melegenda, serta kecantikan Ken Dedes. Agenda peringatan hari jadi Kota Malang sebagai replika sejarah yang menggambarkan kejayaan dan adi luhung budaya Kota Malang dan kondisi serta situasi yang kondusif merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengemas pesona budaya Kota Malang agar dapat menjadikan Kota Malang sebagai salah satu daerah tujuan wisata budaya di Jawa Timur. Disamping pengembangan wisata alam, wisata industri dan wisata minat khusus yang berpotensi dapat menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

##### **Proyeksi Ancaman :**

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terdapat ancaman berupa perubahan perilaku yang semakin permisif dan perubahan budaya yang semakin meninggalkan nilai-nilai luhur budaya ketimuran/lokal.
2. Keramahan, kesederhanaan, dimensi kerakyatan, konsep kehidupan yang merepresentasikan harmonisasi hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan jika tidak diantisipasi dengan baik akan mengalami degradasi.
3. Masuknya arus globalisasi yang membawa arus informasi, modal, dan tenaga kerja bisa mengancam eksistensi budaya lokal.
4. Ketidakstabilan politik nasional yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang dapat mengancam instabilitas politik di daerah yang berdampak terhadap degradasi hubungan antar manusia, kelompok sosial kemasyarakatan dan kerukunan dalam masyarakat.

**Proyeksi Permasalahan :**

1. Rendahnya dukungan dan semangat masyarakat untuk menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan tradisi dan budaya lokal masih akan menjadi masalah yang akan dihadapi Kota Malang.
2. Masalah degradasi dan dekadensi moral di kalangan masyarakat masih akan menjadi masalah yang akan dihadapi Kota Malang.
3. Kemungkinan terganggunya stabilitas politik nasional dalam rentang waktu 20 tahun mendatang tentunya akan mempengaruhi kondisi politik Kota Malang.

**Proyeksi Keberhasilan :**

Proyeksi keberhasilan bidang sosial, budaya, dan politik yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu :

1. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kota Malang, yaitu masyarakat kota yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral-etika, dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
2. Terbentuknya budaya inovatif yang berorientasi iman dan taqwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.
3. Terwujudnya stabilitas politik dan kehidupan démokrasi di Kota Malang yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik.
4. Terciptanya budaya politik masyarakat yang baik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang ditandai oleh :
  - a. Terwujudnya kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media.
  - b. Terwujudnya berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
5. Terwujudnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Terbangunnya manusia seutuhnya yang berpondasi pada nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari dan komunikasi yang harmonis antar umat beragama.

### **III.4.3. Output :**

Prediksi kondisi sosial, budaya dan politik Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu :

1. Terjadi pergeseran nilai-nilai sosial kemasyarakatan di Kota Malang seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi.
2. Permasalahan sosial akan semakin kompleks, meliputi masalah prostitusi, aborsi, kriminalitas, anak jalanan, narkoba dan napza, dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kota Malang, yaitu masyarakat kota yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral-etika, dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
4. Demokratisasi politik lokal akan terus berkembang di kota Malang.

## **III.5. Prasarana dan Sarana**

### **III.5.1. Input :**

#### **Permasalahan :**

1. Kota Malang sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat daerah-daerah *hinterland*-nya, telah mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup perkotaan. Beberapa kawasan penting di pusat kota seperti kawasan Pusat Kota (*Central Business District/CBD*) Kayu Tangan sudah mencapai tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi, di sisi lain ada kawasan-kawasan yang relatif kurang berkembang. Wilayah Kecamatan Klojen relatif pesat dan merata perkembangannya, sedangkan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun tingkat perkembangannya tidak merata dan kurang menyebar.
2. Tingkat urbanisasi sebagai akibat kesenjangan pola ekonomi perkotaan dan perdesaan cenderung meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait

dengan pemanfaatan fasilitas publik yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Malang.

3. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Malang baik untuk permukiman, perdagangan dan industri menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun.
4. Perdagangan dan jasa baik tingkat primer maupun sekunder mendominasi di Kawasan Pusat Kota (*CBD*) dan hampir semua ruas jalan utama (Jalan Protokol Kota) atau dikenal sebagai "*concentric linier*", hal ini akan menyebabkan penumpukan pergerakan ke pusat kota dan pergerakan di sepanjang jalan-jalan protokol akan berdampak pada pengurangan kenyamanan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, serta menyebabkan kemacetan.
5. Sistem jaringan jalan raya utama di Kota Malang membentuk pola linier kosentris, dengan tumpuan utama jalan penghubung antar kota yang berkembang menjadi jalan utama wilayah fungsional. Fasilitas transportasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Kota Malang selama 7 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.
6. Sistem jaringan drainase belum memadai di seluruh penjuru kota. Kota Malang yang berada di ketinggian 400 s.d. 600 di atas permukaan air ditambah dengan keberadaan sungai-sungai besar yang membelah Kota Malang sudah seharusnya Kota Malang tidak pernah mengalami banjir atau terjadi genangan pada saat musim hujan.
7. Tingkat capaian pelayanan air bersih di Kota Malang baru mencapai 64%, artinya belum keseluruhan penduduk Kota Malang mampu menikmati pelayanan kebutuhan air bersih. Keterbatasan sumber air bersih (hampir keseluruhan sumber berada di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu) dan sistem jaringan distribusi air bersih yang belum tersedia dan menjangkau seluruh wilayah Kota Malang. Disamping itu tingkat pelayanan masih mencapai standar kualitas air bersih belum mampu mencapai kualitas air minum, walaupun sudah terdapat beberapa lokasi yang mampu mendistribusikan air minum misalnya kawasan Pondok Blimbing Indah dan Mojolangu.

### **Capaian Keberhasilan :**

1. Tersedianya berbagai prasarana dan sarana publik yang cukup memadai. Prasarana perdagangan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, pengelolaan persampahan, transportasi dan prasarana publik lainnya cukup tersedia, serta tersedianya taman-taman kota dan hutan kota yang rapi, indah dan terpelihara sebagai tempat aktivitas bermain dan rekreasi sehingga mampu menciptakan kawasan yang semakin sejuk dan asri bagi warga Kota Malang.
2. Akses terhadap air bersih di Kota Malang relatif cukup baik. Jumlah pelanggan pada Tahun 2005 tercatat 83.071 yang sebagian besar adalah kelompok pelanggan non niaga yang terdiri dari rumah tangga dan instansi pemerintah. Capaian pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi dari 64 % menjadi 80% sebagai standar pelayanan air bersih untuk predikat Kota Sehat.
3. Rasio elektrifikasi bagi rumah tangga relatif baik. Mayoritas rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan PLN yaitu sebanyak 663.511 pelanggan pada Tahun 2005. Mayoritas pelanggan adalah rumah tangga yaitu sebesar 90,61% dengan jumlah pemakaian 617.460.769 KWh atau 53,13% dari total pemakaian 1.215.176.450 KWh.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana olah raga bagi masyarakat Kota Malang terutama dengan terselesaikannya pembangunan GOR Ken Arok dan renovasi Stadion Gajayana.
5. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Malang maka pemerintah Kota Malang telah membangun jalan layang (*fly over*) di Jl. Martadinata dan Jl. Ahmad Yani.

### **III.5.2. Analisis :**

#### **Proyeksi Peluang :**

1. Sebagai pusat aglomerasi perkotaan, Kota Malang memerlukan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat di bidang perdagangan dan jasa karena Kota Malang memberikan pelayanan sebagai pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik bagi warga kota sendiri maupun masyarakat di daerah-daerah sekitarnya. Pusat-pusat perdagangan dan jasa yang saat ini berorientasi di pusat kota dan berjajar di jalan-jalan protokol utama sudah saatnya harus disebar ke pusat-pusat pertumbuhan kawasan permukiman di

wilayah yang kurang berkembang agar tercapai pemerataan fasilitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah-wilayah *hinterland*.

2. Dengan terbatasnya lahan di wilayah Kota Malang, maka peluang untuk pengembangan bangunan vertikal menjadi sangat terbuka sehingga koneksitas tidak terlalu jauh.
3. Pola pergerakan kendaraan yang saat ini “*linier concentric*” harus segera dirubah menjadi “*radial concentric*”, artinya pemerintah Kota Malang harus segera mengembangkan jalan-jalan *inner ringroad* dan *outer ringroad* sebagai pemecah pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal.
4. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dengan proporsi mencapai 82,54 %. Moda transportasi massal yang nyaman menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk direalisasikan. Agar masyarakat tetap nyaman bermobilisasi dengan menggunakan transportasi massal, antara lain yaitu rencana pengembangan Kereta Api *Commuter* (Kepanjen-Malang-Lawang) dan Jalur-jalur Bus Kota, sehingga kesemrawutan lalu lintas dapat ditekan juga secara umum terjadi penghematan penggunaan BBM yang berdampak pada pengeksploitasian SDA secara bijak.

#### **Proyeksi Ancaman :**

1. Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang menimbulkan dampak terjadinya permukiman yang padat, jika hal ini tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan permukiman kumuh.
2. Semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor, sedangkan di sisi lain kapasitas jalan di Kota Malang relatif tetap, jika sistem transportasi tidak ditata dengan baik akan terjadi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.
3. Jika kontinuitas pelayanan air bersih dan PDAM tidak dijaga, maka masyarakat akan cenderung menggunakan air tanah yang bisa mengancam kesehatan karena mengandung bakteri *coli*.
4. Tidak dikelolanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara optimal, akan mengakibatkan penumpukan sampah yang selanjutnya menurunkan higienitas dan kualitas lingkungan disekitar TPA.



**Proyeksi Permasalahan :**

1. Sulitnya relokasi dan penataan kawasan kumuh terutama di kawasan yang aktivitas ekonominya padat, maupun pada sepanjang DAS.
2. Meningkatnya jumlah usaha informal (PK-5) yang memakai badan jalan sebagai lokasi usaha, menambah kemacetan dan keruwetan transportasi.
3. Kurang tertatanya sarana transportasi menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara.
4. Terbatasnya lahan dalam rangka penataan dan peningkatan sarana dan prasarana.

**Proyeksi Keberhasilan :**

1. Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan.
2. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
3. Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi.
4. Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

**III.5.3. Output :**

Prediksi kondisi prasarana dan sarana Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu :

1. Pembangunan perumahan di daerah perkotaan akan mengarah pada model bangunan vertikal karena keterbatasan lahan.
2. Kebutuhan akan sarana transportasi yang aman dan nyaman semakin tinggi. Hal itu menuntut perlunya perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi publik, seperti jalan, jembatan, moda transportasi umum, dan sistem lalu lintas.
3. Transportasi akan menjadi faktor pendukung yang sangat vital sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, pengembangan sosial budaya, politik, pertahanan

dan keamanan serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota di masa yang akan datang.

4. Semakin tingginya tuntutan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan sosial, agar terwujud lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, menarik dan indah serta menjaga keserasian dan keselarasan nilai sosial budaya yang merupakan ciri khas daerah.
5. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka di masa yang akan datang kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi. Jaringan infrastruktur nirkabel di Kota Malang akan menjadi kebutuhan penting.
6. Di masa mendatang, permasalahan terhadap pengelolaan persampahan kota semakin kompleks. Kebutuhan terhadap instalasi pengolahan sampah dan limbah yang modern dan efisien menjadi sangat vital.

### **III.6. Pemerintahan**

#### **III.6.1. Input :**

##### **Permasalahan :**

1. Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Malang masih perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kerja aparat terkait dengan beberapa faktor, antara lain:
  - a. Belum optimalnya koordinasi intern dan antar instansi sehingga masih ditemui tumpang tindih dan hambatan dalam implementasi kebijakan.
  - b. Belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
2. Pelayanan umum kepada masyarakat di semua fungsi pemerintahan belum didukung oleh personil dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang memadai. Standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan kota di masa mendatang menuju terwujudnya *good governance*.

**Capaian Keberhasilan :**

1. Semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
2. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.
3. Kota Malang berhasil memperoleh penghargaan bidang pelayanan berupa Citra Pelayanan Prima atau Citra Pelayanan Publik serta lebih dari 40 penghargaan lain baik di tingkat nasional maupun regional (provinsi).

**III.6.2. Analisis :****Proyeksi Peluang :**

1. Regulasi pelayanan perijinan dan pemberian insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang akan direspon positif oleh pelaku bisnis dengan investasi yang menguntungkan. Iklim investasi di Kota Malang akan berkembang secara dinamis.
2. Dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, Kota Malang akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlihat nyata dalam praktek pembangunan kota.

**Proyeksi Ancaman :**

1. Kurangnya kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi SDM Pemerintah dalam menghadapi era globalisasi, teknologi, dan informasi akan menyebabkan perkembangan pembangunan Kota Malang menjadi tertinggal di banding daerah-daerah lainnya.
2. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengikuti perkembangan jaman.

**Proyeksi Permasalahan :**

1. Diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah Kota Malang yang secara administrasi dapat menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang

diamanatkan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi Pemerintah Kota Malang belum dioptimalkan.
3. Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan *good governance*. Sebagai salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang, maka fungsi ini perlu diperhatikan lebih mendalam berkaitan dengan masih banyaknya berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi umum.

**Proyeksi Keberhasilan :**

1. Tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh aparatur Pemerintah yang berwibawa, bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, profesional, dan bertanggung jawab, serta mempunyai kompetensi tinggi.

**III.6.3. Output :**

Prediksi kondisi tata pemerintahan Kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah Kota Malang, membudayanya disiplin dan etos kerja, serta meningkatnya kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui tersedianya prasarana dan sarana pengawasan sesuai perkembangan teknologi.

### III.7. Wilayah dan Tata Ruang

#### III.7.1. Input :

##### Permasalahan :

1. Permasalahan pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang Kota Malang sampai saat ini belum terjadi keseimbangan baik dalam arti pemerataan aktivitas antara wilayah pusat kota maupun wilayah tepi/pinggiran, efisiensi antara wilayah satu dengan yang lain dalam pemanfaatan ruang kota, pergerakan penduduk, serta adanya kesenjangan kegiatan. Keadaan ini terjadi karena kurang meratanya jalur akses (baik jalan arteri maupun jalan kolektor).
2. Rencana pengembangan wilayah Kota Malang yang telah ada, seperti rencana Jalur Lingkar Barat (JALIBAR), Jalur Lingkar Utara, dan Jalur Lingkar Timur (JALITIM), maupun rencana jalan tol Gempol-Malang-Kepanjen sebenarnya dapat menjadi pemicu kearah keseimbangan pengembangan Kota Malang yang lebih konkrit.
3. Pengembangan wilayah sebagai salah satu konsekuensi atas peningkatan jumlah penduduk baik karena peningkatan jumlah kelahiran maupun migrasi, selalu akan berakibat kepada perubahan fungsi ruang kota, dari wilayah pertanian (persawahan dan tegalan) menjadi kawasan permukiman di wilayah pinggir kota, maupun kawasan-kawasan permukiman kota yang berubah menjadi kawasan lainnya. Sudah saatnya tata ruang mengarahkan pertumbuhan dan perkembangannya ke wilayah-wilayah yang masih belum berkembang dan membatasi perkembangan permukiman di wilayah yang sudah padat.
4. Penambahan RTH harus diupayakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seperti kita ketahui Kota Malang pada awalnya dirancang dengan Konsep "*Garden City*" atau Kota Taman oleh Tomas Karsten (1933), sehingga agar identitas diri Kota Malang tidak hilang maka konsep Kota Taman ini harus dilestarikan.
5. Peningkatan intensitas kegiatan di pusat-pusat pengembangan (pada setiap SWP), jika tidak dilengkapi dengan panduan pengembangan wilayah/kota yang secara konsisten dijalankan oleh para aktor pembangun (masyarakat, developer, maupun pemerintah sebagai pemegang otoritas perijinan), maka pembangunan kawasan pusat kota dengan skala besar akan berpotensi

memunculkan permasalahan baru bagi lingkungan sekitarnya. Permasalahan ketidakseimbangan daya dukung sarana dan prasarana lingkungan (jalan, sanitasi lingkungan), dampak sosial, maupun pengaruh dominasi aktivitas ekonomi berskala besar terhadap keberadaan lingkungan permukiman dapat mendorong percepatan perubahan-perubahan fungsi ruang kota di sekitarnya.

6. Pembangunan pusat Kota Malang yang semakin pesat, kemajuan di bidang pendidikan sebagai konsekuensi terhadap upaya pengembangan kota, akan semakin memperkuat faktor penarik (*pull factors*) proses urbanisasi. Aglomerasi penduduk Kota Malang yang dapat terjadi sebagai dampak urbanisasi yang berlebih di masa mendatang sangat mungkin terjadi. Sehingga diperlukan suatu upaya strategis yang dapat memecahkan dan/atau menyebarkan pusat-pusat aktivitas kota yang merata, sehingga proses pergerakan komunitas kota dapat terjadi dalam keseimbangan yang dinamis. Langkah strategis ini bertujuan menumbuhkan kelompok-kelompok kegiatan ekonomi yang cukup besar di tempat-tempat terpilih dan strategis, dengan inti perusahaan-perusahaan (pendidikan, industri, maupun pariwisata) yang cepat tumbuh dan ada kaitannya dengan perekonomian daerah. Kegiatan ini akan merangsang pertumbuhan dan pembangunan daerah yang bersangkutan, karena dapat meningkatkan barang produksi, membuka kesempatan daerah untuk memperoleh modal dan teknologi, meningkatkan lapangan kerja, serta menyebarkan rangsangan-rangsangan pertumbuhan ke wilayah sekitarnya. Idealnya pengaruh-pengaruh tersebut hendaknya hanya terbatas di dalam lingkup wilayah yang bersangkutan, dengan demikian dapat secara terus-menerus mengembangkan kemampuan wilayah itu untuk berkembang.
7. Permasalahan utama pengembangan wilayah dan tata ruang sangat didominasi oleh kenyataan bahwa pranata pengembangan kota (RTRW, RDTR dan perda-perda lainnya) selain mengandung permasalahan pada sisi substansi, juga belum dijalankan secara konsisten oleh seluruh *stakeholders*. Ketaatan terhadap perencanaan dan perancangan kota sebagai pengendali pengembangan kota memiliki posisi yang menentukan keberhasilan pembangunan kota. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu perangkat peraturan tidak/belum dapat ditaati masyarakat, yaitu : (1) rendahnya kesadaran masyarakat; (2) tidak adanya stimulus yang mampu mendorong masyarakat mentaati peraturan; (3) kurang efektifnya perangkat kontrol oleh aparat Pemerintah Kota Malang.

8. Faktor kesadaran masyarakat untuk taat peraturan yang rendah disatu sisi serta kurang tegasnya aparat merupakan penyebab utama kegagalan implementasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan upaya yang strategis antara lain : (1) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana dan rancangan tata ruang kota, sehingga masyarakat akan memahami “manfaat” peraturan tersebut dan ikut merasa memiliki; (2) Sosialisasi produk rencana dan rancangan tata ruang kota, secara efektif; dan (3) kurang tegasnya aparat kita dalam penegakan peraturan. Kondisi ini dipicu oleh adanya “budaya” permisif sebagian masyarakat.

**Capaian Keberhasilan :**

1. Penghargaan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2009 antara lain:
  - a. Penghargaan bidang kesehatan dan terbaik untuk Program Kota Sehat berupa Manggala Karya Bhakti Husada;
  - b. Penghargaan bidang kebersihan dan pertamanan (penghijauan) berupa Piala Adipura.
2. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Malang dalam tahun 2009 pada semua bidang berjumlah 322 penghargaan baik skala regional, nasional maupun internasional.

**III.7.2. Analisis :**

**Proyeksi Peluang :**

1. Posisi Kota Malang yang strategis dalam konstelasi wilayah Provinsi Jawa Timur harus didukung dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kota Malang yang mampu mengakomodasi terjadinya aglomerasi pertumbuhan kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa di wilayah Malang Raya, artinya RTRW Kota Malang harus diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten Malang, dan RTRW Kota Batu secara menyeluruh sebagai satuan wilayah Malang Raya yang utuh.
2. Kota Malang akan berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah Malang Raya atau bahkan lebih luas lagi sebagai pusat dari wilayah-wilayah kabupaten di bagian Selatan Provinsi Jawa Timur yang berfungsi sebagai pusat simpul distribusi barang dan jasa, akses pergerakan ekonomi, maupun sebagai sentra penyediaan fasilitas pelayanan umum (khususnya pendidikan

dan kesehatan). Oleh karena itu pembangunan dan pertumbuhan infrastruktur menjadi kunci utama keberhasilan penataan ruang kotanya.

3. Penataan ruang kota yang komprehensif melalui pemerataan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan dan pemerataan akses dengan mengembangkan pola *radial concentrik* dengan jejaring jalan berpola *inner ringroad* dan *outer ringroad* akan memberikan dampak pada pemecahan pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal. Pemerataan akses jalan tersebut akan semakin mendorong keseimbangan pertumbuhan wilayah-wilayah kota di bagian Timur dan bagian Barat secara harmonis.
4. Peningkatan aktivitas kota di pusat-pusat pertumbuhan baru akan berpeluang bagi pengembangan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kerjasama antar daerah (Malang Raya) dalam pengembangan wilayah berpeluang besar bagi percepatan pembangunan di ke tiga wilayah tersebut.
5. Kota Malang pada awalnya dirancang dengan Konsep "*Garden City*" atau Kota Taman oleh Tomas Karsten (1933) merupakan potensi yang spesifik dan unik sehingga dapat dikembangkan menjadi identitas rancangan Kota Malang yang lestari.

#### **Proyeksi Ancaman :**

1. Dengan melihat fungsi dan kepentingan struktur tata ruang wilayah yang demikian vital, sementara melihat kondisi kesemrawutan tata ruang wilayah kota pada saat ini yang diwarnai dengan kondisi kemacetan lalu lintas pada jalan-jalan utama kota, banjir dan genangan pada saat-saat musim hujan tiba, maka peran sebagai "*region center*" yang harus menggerakkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi sia-sia atau bahkan musnah.
2. Prioritas utama pada perkembangan RTRW Provinsi Jawa Timur saat ini masih mengutamakan SWP Gerbangkertosusila Plus-plus, yang implikasinya terjadinya aglomerasinya kawasan Industri dan perdagangan skala regional dan nasional di wilayah utara Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan berdampak pada terjadinya perkembangan dan pembangunan infrastruktur beserta penumpukan *capital flow* yang cukup besar di wilayah Utara Jawa Timur.



**Proyeksi Permasalahan :**

1. Masalah yang akan dihadapi dalam RTRW Kota Malang dalam waktu 20 tahun ke depan terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan yang terlalu tersentralistik di pusat perkotaan (Klojen) yang kondisi eksistingnya sudah terlalu padat, sudah mencapai ambang batas daya dukung lingkungannya (kawasan ini 90% sudah terbangun). Pemecaran dan pemerataan perkembangan fasilitas pelayanan dan infrastruktur kota menjadi suatu hal yang harus diutamakan didalam penataan ruang wilayah Kota Malang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2001-2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 sudah tidak mampu lagi mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan dinamika masyarakat kota untuk masa 20 tahun yang akan datang, sudah terlalu banyak deviasi (penyimpangan) peruntukan lahan antara yang direncanakan dengan kondisi perkembangannya pada saat ini. Sehingga sudah saatnya RTRW Kota Malang harus dievaluasi/direview kembali.

**Proyeksi Keberhasilan :**

Keberhasilan bidang tata ruang wilayah yang hendak dicapai Kota Malang ke depan, yaitu :

1. Tercapainya pemerataan persebaran fasilitas pelayanan umum di segenap pelosok kota sesuai dengan hierarki struktur tata ruang kotanya, sehingga memudahkan bagi warga masyarakat untuk mengakses kebutuhan hidup sehari-hari, terutama di wilayah *hinterland*.
2. Terkendalinya perkembangan dan pembangunan fisik di pusat kota, dan lebih mendorong perkembangan dan pembangunan fisik di wilayah sekitar pusat kota.
3. Tercapainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur prasarana kota di wilayah-wilayah sub pusat kota, agar tercapai pemerataan aksesibilitas pergerakan dan pemerataan sistem utilitas kota secara terpadu.

### III.7.3. Output :

Prediksi kondisi tata ruang kota Malang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Persebaran kawasan permukiman, kepadatan permukiman penduduk dapat seimbang di setiap wilayah atau bagian wilayah Kota Malang, karena hampir setiap bagian wilayah kota telah mendapatkan fasilitas pelayanan yang telah memadai.
2. Aksesibilitas pergerakan transportasi tepat tercapai kondisi yang ideal dengan adanya pemisahan pergerakan internal kota dan eksternal kota melalui pengembangan jalur *Ring Road* Timur, *Ring Road* Barat, maupun *Ring Road* Utara. Pemisahan pergerakan ini sekaligus akan mengurangi frekuensi pergerakan di pusat kota dan akan berdampak pada pengurangan kemacetan pusat kota dan jalan-jalan protokol utama Kota Malang. Perkembangan transportasi jalan juga akan berperan untuk membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil dan memperbaiki akses ekonomi bagi wilayah yang relatif belum berkembang.
3. Tata Ruang Wilayah yang serasi, seimbang dan terpadu secara menyeluruh akan tercipta dengan pendekatan Sistem Tata Ruang Wilayah Malang Raya, meliputi tata ruang wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
4. Terwujudnya tata ruang yang terpadu, infrastruktur yang merata dan fasilitas pelayanan yang terdistribusi seimbang, akan membuat Kota Malang lebih nyaman dan mampu mendorong perkembangan aktivitas ekonomi wilayah di segenap penjuru kota (tidak lagi terkonsentrasi di pusat kota).

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025**

Penetapan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Malang, didasarkan atas kondisi riil, permasalahan, potensi, peluang dan tantangan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun mendatang. Keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan Kota Malang merupakan titik tolak untuk menetapkan prioritas bidang yang dikembangkan ke depan. Mengkritisi relevansi Tri Bina Cita Kota Malang, yang selama ini menjadi “jargon”/moto kota Malang, dengan arahan pengembangan Kota Malang sebagai kota Pendidikan-Pariwisata-Industri, maka dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 ini penekanan bidang Pendidikan dipandang paling relevan untuk dikembangkan. Walaupun sebenarnya ketiga bidang (Pendidikan-Pariwisata-Industri) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini berarti bahwa mengembangkan bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan bidang pariwisata dan bidang industri dan/atau sebaliknya. Akan tetapi sebagai suatu upaya strategis dalam rangka lebih memfokuskan arah pengembangan pembangunan 20 tahun mendatang, isu pengembangan pendidikan di kota Malang menjadi langkah strategis dan realistis melihat perkembangan bidang pendidikan saat ini.

Penetapan visi untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2025 mempunyai konsekuensi terhadap keterkaitan arah pembangunan yang akan dilakukan dengan isu globalisasi dalam kerangka pasar bebas (WTO). Hambatan-hambatan perdagangan bebas dalam kerangka WTO sudah harus dihilangkan pada tahun 2015, sehingga Kota Malang harus mengantisipasi perkembangannya dengan merespon tantangan dan peluang tersebut. Salah satu upaya yang harus dipersiapkan dalam menyikapi tantangan dan peluang globalisasi adalah mempersiapkan SDM untuk meningkatkan daya saing dalam tataran global.

Pengembangan isu pendidikan merupakan keputusan yang sangat strategis, karena pengembangan pendidikan sebagai suatu upaya pembangunan sumberdaya manusia, akan memberikan *multiplier effect* pada pengembangan sektor-sektor lain secara berkelanjutan dalam rangka menuju pasar bebas. Penetapan Visi dan Misi pembangunan kota Malang dan arah pembangunan memberikan konsekuensi bahwa pelaksanaan semua fungsi pemerintahan Kota Malang ke depan harus mengacu pada Visi dan Misi Kota Malang.

#### **IV.1. VISI**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang Kota Malang, menyikapi tantangan dan peluang yang dihadapi, dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Malang, serta faktor-faktor strategis yang ada, maka visi pembangunan Kota Malang 20 tahun ke depan adalah:

**TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN  
YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA, BERWAWASAN LINGKUNGAN  
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**

*Kota Pendidikan yang Berkualitas*, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang ditekankan pada pengembangan bidang pendidikan dalam arti yang sangat luas, selain bidang lainnya. Makna strategis pendidikan yang berkualitas di Kota Malang adalah:

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus memiliki kualitas tinggi dan akan menjadi rujukan baik di tingkat nasional maupun global,
- b. bahwa *outcomes* penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK dan seni, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur),
- c. bahwa kebijakan publik pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi; (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai penguatan fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan institusional (tata kelola); (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/ tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

*Berbudaya*, artinya bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan Kota Malang dalam mencapai visi harus tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang (kearifan lokal) melalui pengembangan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan kota Malang menuju kota Metropolitan. Pemahaman berbudaya, lebih dititik beratkan kepada suatu pencapaian kondisi kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), dan kecerdasan intelektual. Hal ini berarti bahwa pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan selalu mengedepankan keimanan dan ketaqwaan, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas secara utuh, sebagai wujud pembangunan manusia seutuhnya.

*Berwawasan Lingkungan*, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan

serta pemukiman Kota Malang. Makna wawasan lingkungan (sosial, budaya, alamiah) dalam pembangunan akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan perekonomian (pertumbuhan dan pemerataan ekonomi), tetapi juga orientasi pada konservasi (*conservation orientations*), dan berorientasi pada masyarakat (*community orientations*).

*Sejahtera*, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spirituil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

## IV.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang mengemban misi-misi pembangunan untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut :

### **a. Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal**

Posisi Kota Malang yang strategis dengan iklim yang kondusif menjadikan Malang sebagai kota tujuan pendidikan untuk Wilayah Timur Indonesia serta menjadikan Kota Malang sebagai rujukan pengembangan bidang pendidikan, baik dalam lingkup nasional maupun global. Melalui pembangunan bidang pendidikan diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dengan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja yang berorientasi kompetensi global dan memiliki kearifan lokal dapat dengan mudah memasuki dunia kerja. Keberhasilan capaian kualitas pendidikan di Kota Malang baik dalam tata kelola maupun *outcomes*-nya akan menjadi rujukan nasional dan internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bidang “*industri*” kependidikan dan “*pariwisata*” pendidikan.

### **b. Mewujudkan SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya**

Mewujudkan visi Kota Malang melalui peningkatan pembangunan SDM (tenaga kependidikan, masyarakat dan aparatur pemerintahan,) yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani. Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan yang berkualitas, yang akan meningkatkan kualitas sistem dan metode pendidikan di semua level (PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA dan Perguruan Tinggi).

**c. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas**

Mewujudkan visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas yang menjadi rujukan di tingkat nasional dan global, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan dalam bentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat sumber pengetahuan (*resource centers*), konservasi museum dan tinggalan-tinggalan sejarah kota (*heritage building conservation*) sebagai sumber belajar, serta pengembangan fasilitas *wifi* untuk kemudahan akses informasi berbasis internet. Pemanfaatan ICT dalam pengembangan pendidikan dalam rangka memperluas akses informasi teknologi, melalui Jardiknas dan JIS diarahkan untuk menuju “*cyber society*” yang berbudaya dengan kearifan lokal. Kebijakan pengembangan pendidikan oleh pemerintah dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/ tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah). Peran serta seluruh *stakeholders* (masyarakat bisnis, pemerintah dan masyarakat yang mampu secara finansial) berpartisipasi aktif dalam mendorong peningkatan pendidikan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

**d. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan**

Mewujudkan kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan wilayah kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota agar mampu mendukung dan memwadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendudukkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), secara proporsional. Kebijakan pemanfaatan ruang oleh

pemerintah didorong untuk mewujudkan penyediaan ruang terbuka (publik maupun privat) sebesar 30 % secara berkelanjutan. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota. Upaya pembangunan kota dilakukan melalui pembangunan yang berorientasi pada pengembangan (*development orientation*), konservasi (*conservation orientation*), dan kepentingan masyarakat (*community orientation*) dalam rangka menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

**e. Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional**

Mewujudkan visi Kota Malang dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung oleh perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif, dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan kemampuan (*capacity building*) aparatur pemerintah kota dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan akademik, *skill*, dan kemampuan *management* dalam rangka mewujudkan *clean governance*, yang didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

**f. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Mewujudkan visi Kota Malang dengan dilandasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi etika serta budaya bangsa yang didasari oleh norma-norma agama. Misi ini memiliki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan akan memiliki makna kesejahteraan spiritual, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera baik secara materiil maupun spirituil. Ketenteraman lahir dan batin hanya dapat terwujud apabila kehidupan sosial masyarakat didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**g. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan**

Mewujudkan visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang didorong oleh keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan melalui upaya-upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi

tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung. Kebijakan pemerintah kota di bidang ekonomi perkotaan ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran dengan mendorong dibukanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat melalui peningkatan investasi yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **h. Mewujudkan Kota Malang Yang Sejahtera**

Mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera, melalui peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, serta penghidupan sosial, budaya dan ekonomi yang baik. Kebijakan pengembangan kegiatan perekonomian berpihak kepada kepentingan dan menuju kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, serta didukung oleh kesadaran dan perilaku konstruktif masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.



**BAB V**  
**ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**  
**TAHUN 2005-2025**

Rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang mengacu pada arah pembangunan sebagai berikut:

**A. Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal**

Pembangunan bidang pendidikan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan kualitas tinggi, kompetensi sesuai dengan dunia kerja yang berorientasi kompetensi global dan memiliki kearifan lokal, akan meningkatkan daya saing SDM. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat akan meningkatkan kemampuan SDM di segala lini dalam melaksanakan proses pembangunan Kota Malang. Kearifan lokal lebih dititikberatkan kepada pemahaman SDM sebagai *outcome* terhadap tata nilai budi pekerti luhur, jujur dengan kemampuan pendidikan yang prima.

**B. Terwujudnya SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya**

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kondisi sebagai berikut :

1. Terwujudnya visi Kota Malang dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani.
2. Terwujudnya masyarakat Kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia.
3. Arah pembangunan sumber daya manusia dan Iptek diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat Kota Malang menuju persaingan nasional dan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat Kota Malang di segala bidang.

4. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas

**C. Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas**

Dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan, harus ditunjang dengan lingkungan kota yang kondusif bagi pengembangan kota pendidikan yang berkualitas dan menjadi rujukan nasional dan global melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penciptaan atmosfer sosial budaya dan aktifitas yang kondusif bagi proses pendidikan, pengembangan infrastruktur penunjang, pemanfaatan ICT dengan membuka jaringan nirkabel serta membuka akses khususnya bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

**D. Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan**

Pembangunan fisik Kota Malang 20 tahun ke depan, dalam rangka peningkatan pemanfaatan ruang, serta keseimbangan wilayah maka pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan diarahkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendudukkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %, secara proporsional.
3. Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur Kota Malang.

**E. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan berkelanjutan**

1. Mewujudkan visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang didorong oleh keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan rnembangkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan dengan upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung.
2. Arah pembangunan ekonomi Kota Malang diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam

pengelolaan sumber daya di Kota Malang, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah.

#### **F. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum**

Mewujudkan visi Kota Malang dengan menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) dengan upaya pengembangan budaya tertib hukum disemua lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan Kota Malang yang demokratis berlandaskan atas hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Sasaran keberhasilan dalam mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum antara lain adalah:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara berpolitik;
- c. Meningkatnya *Good Governance* dalam tata kelola badan-badan publik;
- d. Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi *stakeholders* kota dalam penyelenggaraan tata kelola kota mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- e. Meningkatnya komunikasi yang interaktif dan pemerintah dan masyarakat secara intensif.

#### **G. Mewujudkan Tata Pemerintahan dan Aparatur Yang Professional**

Mewujudkan visi Kota Malang dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

#### **H. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Masyarakat Malang yang agamis adalah wujud masyarakat Malang di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis, didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **I. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan**

Arah pembangunan untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan dicapai melalui penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan keserasian pemanfaatan ruang kota, pendayagunaan sumber daya alam, dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.

## **J. Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera**

Kota Malang yang sejahtera merupakan tingkatan taraf hidup masyarakat secara optimum baik dari sisi pendapatan perkapita, peningkatan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat serta berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi di Malang masa 20 tahun mendatang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Malang yang sejahtera, pemerintah kota memfasilitasi, mendorong dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat yang kurang dan atau tidak mampu secara ekonomi.

### **V.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025**

#### **V.1.1. Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal**

Dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan, upaya pembangunan bidang pendidikan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan kualitas tinggi, kompetensi sesuai dengan dunia kerja yang berorientasi kompetensi global dan memiliki kearifan lokal, akan meningkatkan daya saing SDM. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat akan meningkatkan kemampuan SDM di segala lini dalam melaksanakan proses pembangunan Kota Malang. Kearifan lokal lebih dititikberatkan kepada pemahaman SDM sebagai *outcome* terhadap tata nilai budi pekerti luhur, jujur dengan kemampuan pendidikan yang prima.

Dalam mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk dapat tercapai dengan terpenuhinya kondisi sebagai berikut :

1. Terpenuhinya jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas (sertifikasi sesuai UU guru dan Dosen) yang memadai di semua level/jenjang

- pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi). Dalam hal ini pemerintah memberikan arahan yang jelas akan ketercapaian kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
2. Terwujudnya kebijakan politik pemerintah kota yang secara konsisten dan berkelanjutan berorientasi pada kepentingan peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan cara :
    - a. Mengambil kebijakan yang terfokus dan memihak pada kemajuan serta perkembangan pendidikan secara menyeluruh;
    - b. Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan fungsi kawasan;
    - c. Memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi untuk dapat meningkatkan pendidikannya dengan biaya gratis dan/atau terjangkau.
    - d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas semua *stakeholder* dalam memajukan pendidikan Kota Malang;
    - e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah kota melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
    - f. Meningkatkan pengawasan terhadap keberlanjutan program-program pembangunan yang telah disusun.
  3. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pendidikan. Hal ini ditandai oleh kenaikan APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni), berkurangnya angka buta huruf dengan cara :
    - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif;
    - b. Menggugah kesadaran masyarakat Kota Malang tentang arah pembangunan Kota Malang terkait visi dan misi tentang pendidikan;
    - c. Menjalinkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan Kota Malang;
    - d. Menjalinkan kerjasama secara simbiosis mutualisme antara 3 (tiga) elemen terkait yaitu pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat.
  4. Terwujudnya peningkatan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi.

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang unggul, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh yang dengan cara :
  - a. Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai dengan standar kompetensi yang diharapkan;
  - b. Terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman;
  - c. Tersedianya kelengkapan dan peralatan penunjang kegiatan pendidikan yang memadai;
  - d. Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan;
  - e. Terbangunnya fasilitas-fasilitas pendidikan untuk masyarakat penyandang cacat.
6. Terjangkaunya akses informasi yang mudah melalui kesiapan dan daya dukung masyarakat terhadap laju perkembangan dunia pendidikan berbasis teknologi, melalui JARDIKNAS dan JIS (Jaringan Informasi Sekolah) dengan cara :
  - a. Membangun sistem informasi yang memuat segala aspek terkait dengan dunia pendidikan melalui jaringan informasi sekolah (JIS);
  - b. Memberikan kemudahan akses dan pencapaian informasi skala nasional dan internasional, melalui koneksi jaringan pendidikan kota Malang dengan Jardiknas;
  - c. Medorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penyaluran informasi agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau sasaran dengan baik;
  - d. Meningkatkan promosi nasional dan internasional tentang dunia pendidikan Kota Malang.
  - e. Meningkatkan jalinan kerjasama yang harmonis antara *stakeholders* yang terkait dan institusi pendidikan di dalam dan luar negeri sebagai konsekuensi pasar bebas dalam kerangka WTO
7. Terwujudnya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh, dengan cara :
  - a. Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
  - b. Meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pengajar yang berorientasi pada standar nasional dan internasional;
  - c. Menerapkan pola penjarangan dan penerimaan pelajar/mahasiswa yang objektif;

- d. Menerapkan manajemen pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
- e. Menerapkan metode pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien;
- a. Menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas dalam berkarya guna menyokong dan memotifasi dunia pendidikan.

**V.1.2. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya**

Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan dalam 20 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai kondisi sebagai berikut:

1. Terwujudnya visi Kota Malang dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani.
2. Terwujudnya masyarakat Kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia. Terwujudnya tujuan Kota Malang dalam pembangunan bidang sumber daya manusia dan Iptek dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terbentuknya SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam pembangunan Iptek;
  - b. Terciptanya pemahaman masyarakat kota Malang akan pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kota;
  - c. Terwujudnya partisipasi konkrit masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Arah pembangunan sumber daya manusia dan Iptek diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat Kota Malang menuju persaingan nasional dan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat Kota Malang di segala bidang. Ada 4 (empat) aspek yang penting dalam membangun SDM berkualitas untuk konsep perencanaan pembangunan Kota Malang yaitu:

- a. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar ditingkatkan melalui :
- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (sustainable) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan ;
  - 2) Perbaikan perilaku gizi masyarakat ;
  - 3) Peningkatan kualitas gizi masyarakat ;
  - 4) Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan ;
  - 5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa ;
  - 6) Meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dan rentan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsive terhadap kebutuhan.
- b. Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global ditingkatkan dengan cara:
- 1) Perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh sektor industri dan jasa;
  - 2) Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global;
  - 3) Tersedianya lembaga pelatihan dan keahlian dalam mencetak tenaga terampil;
  - 4) Penguasaan teknologi dan informasi dalam percaturan global;
  - 5) Penyaluran tenaga kerja dengan satu sistem koordinasi yang kompeten.
- c. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan :
- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu,



- efektif, merata, dan terhangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas ;
- 2) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ;
  - 3) Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan ;
  - 4) Peningkatan peran pemerintah Indonesia dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial ;
  - 5) Pengenalan pendidikan seks dan reproduksi sejak dini serta gambaran keluarga ideal.
- d. Partisipasi masyarakat di segala bidang ditingkatkan dengan cara:
- 1) Peningkatan kualitas media informasi yang mencakup pembangunan dan pengembangan di segala bidang;
  - 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat kota Malang sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman;
  - 3) Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (*learning and critical society*);
  - 4) Terciptanya media cetak dan elektronik sebagai wadah dalam pencapaian informasi terkini;
  - 5) Terciptanya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kota.
4. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas, diarahkan untuk:
- a. Peningkatkan IPM atau indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*);
  - b. Peningkatkan indeks daya saing sumber daya manusia;
  - c. Peningkatkan pengguna media informasi baik informasi cetak maupun elektronik;
  - d. Peningkatkan jumlah tenaga kerja yang handal dan terampil dalam skala regional, nasional dan global;
  - e. Terciptanya kesejahteraan yang merata dalam masyarakat kota Malang.

### **V.1.3. Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas**

Dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan, harus ditunjang dengan lingkungan kota yang kondusif bagi pengembangan kota pendidikan yang berkualitas dan menjadi rujukan nasional dan global.

Pembangunan lingkungan pendidikan yang kondusif diarahkan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Malang ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di semua level pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi. Sertifikasi terhadap setiap satuan penyelenggara pendidikan dilakukan untuk menjamin kualitas penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan daya saing SDM yang memiliki standart kompetensi keahlian maupun akademik, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur keseimbangannya antara pendidikan umum (SMA dan Universitas maupun Institut) dan pendidikan keahlian (SMK dan Poltek di tingkat Pendidikan Tinggi), menuju keseimbangan proporsi 50 % : 50 %.
2. Dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan, maka pemerintah Kota Malang diarahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya dan aktifitas yang kondusif bagi proses pendidikan di Kota Malang.
3. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan dalam bentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat sumber (*resource centers*), museum dan tinggalan-tinggalan sejarah kota (*heritage building conservation*) sebagai sumber belajar.
4. Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan kota pada masa kolonial merupakan aset yang dapat menjadi sumber-sumber kajian bidang arsitektur dan planologi, sebagai “museum” kota. Pemerintah kota diarahkan untuk memberikan kebijakan pelestarian bangunan melalui perda yang dapat disepakati dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka membangun sumber-sumber imu dari lingkungan (alam maupun buatan).
5. Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti *convention hall*, *community hall* yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan event berskala nasional di bidang ilmiah dan ekspose hasil-hasil penelitian ilmiah dari satuan pendidikan secara berkala. Fasilitas ini juga ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisata pendidikan di Kota Malang.
6. Pemanfaatan ICT dalam pengembangan pendidikan dalam rangka memperluas akses informasi teknologi, melalui pengembangan fasilitas *wifi* untuk kemudahan akses inforasi berbasis internet Jardiknas dan JIS

diarahkan untuk menuju “*silicon valley*” yang berbudaya dengan kearifan lokal.

7. Kebijakan pengembangan pendidikan oleh pemerintah dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah). Peran serta seluruh *stakeholders* (masyarakat bisnis, pemerintah dan masyarakat yang mampu secara finansial) berpartisipasi aktif dalam mendorong peningkatan pendidikan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

#### **V.1.4. Pengembangan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan**

Pembangunan fisik Kota Malang 20 tahun ke depan, dalam rangka peningkatan pemanfaatan ruang, serta keseimbangan wilayah maka pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan diarahkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota agar mampu mendukung dan memfasilitasi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendudukkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %, secara proporsional. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota. Dalam mewujudkan tujuan Kota Malang dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan diarahkan untuk dapat tercapainya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sistem perencanaan pembangunan kota Malang yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas sosialisasi dan informasi substansi perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan;
  - b. Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah. Perlu disadari kembali esensi pemanfaatan ruang kota adalah sebesar-

- besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti diamankan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
- c. Upaya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dilakukan untuk lebih pemeratakan perkembangan dan pertumbuhan fisik kota ke arah wilayah dan bagian wilayah kota di segenap pelosok-pelosok kota. Sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terpadu secara keseluruhan;
  - d. Kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah didorong untuk mewujudkan penyediaan ruang terbuka (publik maupun privat) sebesar 30 % secara berkelanjutan. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota.
  - e. Partisipasi seluruh *stakeholders* yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan warga Kota Malang, pemerintah, dan swasta dapat menjamin keberlanjutan pembangunan Kota Malang;
  - f. Sinergi dan kerjasama antarwilayah dan antardaerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan hasil upaya pengembangan wilayah dan infrastruktur kota, diperlukan sinergi untuk menghasilkan saling pengerian dan kerjasama antarwilayah sekitar (Pemkot Batu dan Pemkab Malang). Dengan pendekatan perencanaan wilayah secara terpadu Malang Raya, akan mengakomodir berbagai kepentingan wilayah secara menyeluruh dan terpadu satu dengan yang lain;
  - g. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang seimbang dengan pengembangan kota Malang, maupun seimbang bagi perkembangan wilayah Malang Raya dan kepentingan wilayah Kabupaten-kabupaten Bagian Selatan Propinsi Jawa Timur;
  - h. Terciptanya arah pembangunan dan pengembangan Kota Malang yang terarah dan jelas.
3. Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur Kota Malang melalui kebijakan-kebijakan;
    - a. Pemanfaatan kawasan Tepi Air DAS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Malang;
    - b. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai, dengan memperhatikan kapasitas dan ketentuan peraturan yang berlaku;
    - c. Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan;
    - d. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha;

- e. Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi;
  - f. Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh;
  - g. Peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur.
4. Aspek-aspek penting dalam pembangunan sarana dan prasarana, yaitu :
- a. Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Malang dikuatkan dengan cara :
    - 1) Pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu, baik makro maupun mikro;
    - 2) Pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur secara partisipatif;
    - 3) Pengembangan sistem sosialisasi publik terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang aksesibel;
    - 4) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan infrastruktur;
    - 5) Perencanaan yang mengedepankan sisi orientasi dan urgensi kebutuhan.
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dikembangkan dengan cara:
    - 1) Pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
    - 2) Mengembangkan sumber air bersih melalui pengelolaan potensi air sungai secara berkelanjutan;
    - 3) Penurunan tingkat polusi ke dalam sumber-sumber air bersih;
    - 4) Penerapan sistem daur ulang dengan tetap menjaga kualitas dan ke higienisannya;
    - 5) Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
    - 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas sebagai air yang memenuhi baku mutu standar air minum secara internasional.
  - c. Sistem transportasi dikembangkan dengan cara :
    - 1) Peningkatan kesalingterhubungan antarseluruh wilayah kota Malang yang mendorong pertumbuhan wilayah Malang Raya yang

mendorong pertumbuhan wilayah internal dan eksternal yang merata.

- 2) Pola pergerakan kendaraan yang saat ini “*linier concentric*” diubah menjadi “*radial concentric*”, artinya pemerintah kota harus segera mengembangkan jalan-jalan *inner ringroad* dan *outer ringroad* sebagai pemecah pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal. Segera direalisasikan pengembangan jaringan jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat, serta Lingkar Utara.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor yang aman dan nyaman;
- 4) Pengembangan moda transportasi yang menunjang koneksitas dengan daerah *hinterland*, melalui pengembangan transportasi massal. Pengembangan Kereta Api *Commuter* (Kepanjen-Malang-Lawang) dan Jalur-jalur Bus Kota merupakan alternatif mengurangi kesemrawutan lalu lintas, serta penghematan penggunaan BBM yang berdampak mengurangi eksploitasi SDA secara berlebihan dan pengendalian polusi moda transportasi.
- 5) Rencana sistem transportasi diperlukan dalam mendukung perkembangan wilayah dan memperlancar tingkat aksesibilitas baik orang, barang maupun jasa, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat berkurang.
- 6) Rencana perbaikan pola pergerakan transportasi wilayah kota meliputi:
  - a. Pembangunan pola jaringan jalan yang menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota dan memiliki pola jaringan yang menciptakan pergerakan yang lebih efektif dan efisien dengan pembangunan jalan lingkar;
  - b. Pengaturan rute arus pergerakan atau lalu lintas;
  - c. Penataan rute angkutan umum yang pola pergerakannya dapat melayani kepentingan masyarakat secara merata.
  - d. Pembangunan jalan lingkar meliputi:
    1. Jalan Lingkar Barat, dengan jalur pergerakan meliputi:
      - a) Perempatan Institut Teknologi Nasional (ITN) – Pertigaan Sigura-gura (Poharin);
      - b) Pertigaan Sigura-gura (Poharin) – Gasek (batas permukiman);
      - c) Gasek (batas permukiman) – Karang Besuki;

- d) Karang Besuki – Merjosari Sawah;
  - e) Merjosari Sawah – Merjosari (dekat Kantor perumahan Graha Dewata);
  - f) Merjosari (dekat Kantor perumahan Graha Dewata) – Genting Utara;
  - g) Genting Utara – Perumahan Vila Bukit Sengkaling;
  - h) Perumahan Vila Bukit Sengkaling – Pertigaan Mulyoagung;
  - i) Pertigaan Mulyoagung – Pertigaan Sengkaling.
2. Jalan Lingkar Timur dengan jalur pergerakan meliputi:
- a) Jl. Kebon Sari;
  - b) Jl. Satsuit Tubun;
  - c) Jl. Gadang - Bumiayu;
  - d) Jl. Mayjen. Sungkono;
  - e) Jl. Raya Ki Ageng Gribig;
  - f) Jl. Terusan Ki Ageng Gribig;
  - g) Jl. Raya Bamban, tembus ke pertigaan Karanglo.
3. Rencana pembangunan jalan tembus, dengan jalur pergerakan meliputi rute jalan belakang Universitas Muhamadiyah – Jl. Saxophon – Tunggul Wulung – Jl. Candi Panggung – masuk sampai ruas Jl. Soekarno-Hatta.
4. Rencana peningkatan fungsi jalan meliputi:
- a) Pemanfaatan jalan berdasarkan klasifikasi fungsi jalan yang bertujuan untuk menyesuaikan beban pemanfaatan jalan dengan kapasitas tingkat pelayanannya;
  - b) Perbaikan kualitas fisik jalan, melalui penyesuaian dengan klasifikasi dan fungsinya;
  - c) Pelebaran jalan pada ruas Jl. Merjosari – tembus Pasar Dinoyo – tembus Kelurahan Tunggulwulung – terus sampai Karanglo;
  - d) Pelebaran jalan pada ruas Jl. Gajayana – Jl. Sumbersari – Jl. Galunggung agar sesuai dengan persyaratan dimensi jalan kolektor sekunder;
  - e) Peningkatan fungsi jalan menjadi jalan arteri sekunder, yaitu pada ruas Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Mayjen Wiyono, Jl. Ranu Grati, Jl. Danau Toba, Jl. Kyai Ageng Gribig dan Jl. Mayjen Sungkono;

- f) Preservasi jalan dengan pelapisan tambahan atau penyemiran atau penggantian lapis permukaan (*surface dressing*) pada ruas-ruas jalan yang kondisi perkerasan jalannya berlubang dan membutuhkan pengaspalan ulang, yakni ruas Jl. Terusan Laksamana Adi Sucipto, Jl. Ki Ageng Gribig, Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Mergan, dan Jl. Puncak Mandala;
- g) Perbaikan ruas-ruas jalan yang kondisi jalannya bergelombang atau perkerasan jalannya tidak rata, yakni ruas Jl. Panji Suroso, Jl. Kalpataru Jl. Jalan Panglima Sudirman;
- h) Peningkatan fungsi ruas-ruas jalan menjadi jalan arteri sekunder, yaitu pada ruas Jl. Raden Intan – Jl. Raden Panji Suroso – Jl. Sunandar Priyo Sudarmo – Jl. Tumenggung Suryo – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Laksamana Martadinata – Jl. Kolonel Sugiono.

7) Rencana peningkatan sarana transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan rute angkutan umum terutama pada wilayah-wilayah yang belum terlayani yang sebagian besar masih berupa jalur pelosok ataupun kompleks perumahan;
- b. Pengadaan bus pepadu moda, untuk rute Terminal Arjosari, Stasiun Kereta Api Malang Kota Baru, dan Bandara Abdulrahman Saleh;
- c. Pengadaan bus kota, dengan wilayah pelayanan di sepanjang Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Timur;
- d. Pengadaan angkutan umum bus metro;
- e. Pengembangan dan pengadaan kereta api komuter beserta prasarana pelengkapanya (*stasiun/shelter*);
- f. Mendukung pembangunan jalur kereta api *double track* untuk lintasan Malang – Surabaya;
- g. Pembatasan jumlah dan wilayah operasional becak dan ojek.

8) Rencana peningkatan terminal dan sub terminal meliputi:

- a. Peningkatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana terminal tipe A, tipe B, dan tipe C;
- b. Pengalihan fungsi Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi;



- c. Pembangunan terminal barang di sekitar Terminal Hamid Rusdi yang merupakan jalur Jalan Lingkar Timur;
- d. Pengadaan lahan dan alat pengujian kendaraan bermotor di sekitar Terminal Hamid Rusdi.
- e. Penyediaan ruang bagi uji kendaraan bermotor (uji KIR).

9) Rencana peningkatan fasilitas parkir meliputi:

- a. Pengendalian fasilitas parkir di badan jalan melalui:
  - 1. Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir sepanjang kondisi jalan memungkinkan dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta tidak mengurangi kapasitas jalan;
  - 2. Penyediaan rambu-rambu parkir, marka parkir, dan petugas pengatur parkir.
- b. Peningkatan fasilitas parkir di luar badan jalan melalui:
  - 1. Mengarahkan fasilitas parkir pada jalan-jalan utama kota, ruas jalan pada daerah pertokoan atau pusat bisnis ke wilayah di luar badan jalan;
  - 2. Melarang parkir di badan jalan sepanjang telah ada fasilitas parkir di luar badan jalan pada tempat yang sama.

10) Rencana peningkatan stasiun kereta api meliputi:

- a. Pengembangan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat pengguna moda;
- b. Pembangunan stasiun/shelter dan *halte* baru dalam mendukung rencana pengembangan kereta api komuter.

11) Rencana peningkatan sarana penunjang jalan meliputi:

- a. Pengadaan *Automatic Traffic Control System* (ATCS) pada persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas utama wilayah kota, yakni persimpangan Jl. Basuki Rahmat (Kayutangan), persimpangan Sarinah, persimpangan Jl. Ikhwan Ridwan Rais, pertigaan Janti, persimpangan Jl. Satsuit Tubun (Kacuk), persimpangan Jl. Laksamana Adi Sucipto, Perempatan Jl. Sulfat, perempatan Lapangan Rampal, perempatan Klenteng An En Kiong, hingga ke kawasan Terminal Hamid Rusdi;
- b. Perbaikan dan peremajaan kembali rambu-rambu jalan;

- c. Peremajaan dan pengecatan kembali ruas-ruas jalan yang telah memudar markanya maupun pada jalan-jalan yang belum dilengkapi marka jalan;
  - d. Evaluasi pengaruh keberadaan tempat memutar (*U-Turn*) pada kelancaran lalu lintas dan tingkat keselamatan pengguna jalan;
  - e. Penyediaan halte bagi angkutan umum bus metro, bus kota, dan angkutan kota;
  - f. Penyediaan trotoar dan *zebra cross* pada pusat-pusat kegiatan untuk memfasilitasi para pejalan kaki;
  - g. Pengadaan penerangan jalan utama;
  - h. Perbaikan kondisi fisik jembatan penyeberangan; dan
  - i. Pemanfaatan sempadan jalan dan sempadan rel kereta api sebagai ruang terbuka hijau.
- d. Perumahan dan permukiman dikembangkan dengan cara :
- 1) Mendorong partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman;
  - 2) Pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat Kota Malang, dan didukung oleh prasarana sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien;
  - 3) Ketersediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mencapai ketentuan ketersediaan 30 % ruang terbuka di wilayah Kota Malang secara berkelanjutan.
  - 4) Pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - 5) Terciptanya perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat;
  - 6) Terealisasinya sarana prasarana permukiman yang berkualitas dan dikelola secara profesional, mandiri dan efisien.
- e. Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur Kota Malang ditingkatkan dengan cara :
- 1) Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga Kota Malang dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan;
  - 2) Peningkatan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dan rencana yang telah ditetapkan;

- 3) Prioritas terhadap daerah yang benar-benar membutuhkan;
  - 4) Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur;
  - 5) Pengembangan infrastruktur Kota Malang disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai salah satu landasan dalam pengoptimalan fungsinya.
- f. Fungsi tata ruang wilayah dimanfaatkan secara konsisten sesuai perencanaan sebagai acuan dan arah koordinasi pembangunan. Konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang dikendalikan dengan cara :
- 1) Peningkatan pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif;
  - 2) Penyeimbangan rasio lahan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan Kota Malang;
  - 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan;
  - 4) Perwujudan pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan terbuka dan *non-lahan* terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, *aglomerasi* yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*);
  - 5) Penerapan sanksi yang jelas terhadap penggunaan lahan yang melanggar RTRW Kota Malang (Sesuai dengan ketentuan UU tata Ruang No. 26 Tahun 2007);
  - 6) Pentingnya dibuat kebijakan publik tentang pemberian insentif (bonus) bagi masyarakat yang memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan penyediaan ruang-ruang publik/terbuka yang berdampak positif bagi lingkungan Kota Malang.
- g. Pertumbuhan wilayah dan sinergi antarwilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah dilakukan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara daerah sekitarnya dengan cara :
- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;
  - 2) Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan sekitar Malang dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling

menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara daerah sekitarnya;

5. Sasaran keberhasilan dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur kota , adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur kota Malang;
  - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), melalui penataan kembali kawasan tepi Air di sepanjang DAS yang melintas Kota Malang, disamping tetap terjaganya RTH yang telah ada, dalam rangka mewujudkan ketersediaan minimal ruang terbuka (privat dan publik) sebesar 30 %;
  - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, capaian pelayanan harus lebih ditingkatkan agar mencapai minimal 80% sebagai standar pelayanan air bersih untuk predikat Kota Sehat;
  - d. Menurunnya unsur polutan dan gas buang kendaraan bermotor;
  - e. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan moda transportasi masal;
  - f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan bagi seluruh warga Kota Malang;
  - g. Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman serta keseimbangan rasio lahan dan pengembangan infrastruktur Kota Malang;
  - h. Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional, dan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, data basis berbagai daerah. Jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas.

#### **V.1.5. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan berkelanjutan**

1. Mewujudkan visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang didorong oleh keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan rnengembangkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan dengan upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung

tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung.

2. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Tata kelola ekonomi yang terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan;
  - b. Diperlukan perubahan dalam kebijakan-kebijakan fiskal, yang mampu mendorong masuknya investor, pemanfaatan dana-dana yang tersedia seperti SCR, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik;
  - c. Kapasitas pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, Kinerja sektor jasa keuangan yang profesional;
  - d. Tata kelola industri kecil dan menengah yang unggul.
3. Arah pembangunan ekonomi Kota Malang diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di Kota Malang, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah. Ada 5 (lima) aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi untuk konsep perencanaan pembangunan Kota Malang yaitu :
  - a. Peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menjaga keberlanjutan perekonomian Kota Malang. Peningkatan terhadap peranan pemerintah dilakukan dengan :
    - 1) Pengembangan kerangka regulasi *non* diskriminatif tata perekonomian Kota Malang, penyiapan menuju pasar bebas;
    - 2) Peningkatan iklim usaha, dan investasi yang menjamin keberlanjutan perekonomian kota;
    - 3) Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah penyangga, regional, nasional dan global;
    - 4) Penataan sektor formal dan informal yang memperhatikan harmonisasi *setting* sosial, kultural, estetika, dan lingkungan di Kota Malang;
    - 5) Fasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal;
    - 6) Peningkatan aktifitas pemasaran produk yang dihasilkan dan Kota Malang.
  - b. Kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di Kota Malang ditingkatkan dengan cara :
    - 1) Penataan sektor formal dan informal Kota Malang yang memperhatikan harmonisasi *setting* sosial, kultural, estetika, dan lingkungan;

- 2) Peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif;
  - 3) Peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku;
  - 4) Penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
  - 5) Menumbuhkembangkan sektor informal yang mengerucut pada sosial kemasyarakatan.
- c. Kekuatan ekonomi Kota Malang dikembangkan dengan cara :
- 1) Peningkatan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat;
  - 2) Pengembangan sarana dan prasarana *public* yang berbasis keberlanjutan lingkungan;
  - 3) Pengembangan etos pelayanan di bidang jasa;
  - 4) Memperkuat jaringan dan pangsa pasar produk-produk lokal hingga ke luar daerah, bahkan ke luar negeri (pasar bebas);
  - 5) Mendukung penuh usaha-usaha menengah ke bawah sebagai akar perekonomian lokal Kota Malang.
- d. Produktivitas dan inovasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas warga kota Malang dalam pengelolaan sumber daya produktif, dan penguasaan teknologi;
  - 2) Pengembangan diversifikasi produk layanan jasa;
  - 3) Penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sektor jasa;
  - 4) Peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan;
  - 5) Terciptanya lembaga yang menaungi inovasi masyarakat diberbagai bidang.
- e. Keuangan daerah dikembangkan melalui cara :
- 1) Pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif;
  - 2) Revitalisasi sektor jasa keuangan;
  - 3) Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat;
  - 4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak;
  - 5) Transparansi terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah.

4. Sasaran keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang, tersebut dilakukan dengan melihat indikator-indikator sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya produktif;
  - b. Meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Malang;
  - c. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat;
  - d. Meningkatnya investasi di Kota Malang;
  - e. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

#### **V.1.6. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum**

1. Mewujudkan visi Kota Malang dengan menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) dengan upaya pengembangan budaya tertib hukum disemua lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan Kota Malang yang demokratis berlandaskan atas hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila. Prasyarat utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang politik Kota Malang terdiri dari :
  - a. Partisipasi politik warga kota yang tinggi;
  - b. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik;
  - c. Lembaga-lembaga publik yang efektif;
  - d. Budaya politik yang sehat;
  - e. Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses.
2. Enam aspek yang penting dalam Politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu :
  - a. Arah pembangunan politik Indonesia khususnya kota Malang diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan *citizenship* (hak, kewajiban, dan etika politik warga kota) dengan cara :
    - 1) Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
    - 2) Peningkatan efektivitas lembaga dan partai politik;
    - 3) Pengembangan budaya politik yang sehat;
    - 4) Penyediaan media komunikasi politik;
    - 5) Peningkatan hubungan antardaerah dan atau luar negeri.
  - b. Pelaksanaan kebijakan publik diwujudkan melalui penyelenggaraan :
    - 1) Penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi dan media pembelajaran hak dan kewajiban berpolitik;

- 2) Pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap kota secara berkelanjutan;
  - 3) Terselenggaranya panitia penyusunan program pembelajaran tentang kebijakan publik tentang tata cara berpolitik;
  - 4) Realisasi program-program yang telah disusun dan disepakati bersama;
  - 5) Penghayatan dan pelaksanaan berpolitik.
- c. Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik ditingkatkan dengan cara :
- 1) Penyediaan mekanisme dan media pengawasan kinerja badan-badan publik;
  - 2) Peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN);
  - 3) Penyediaan wadah aspirasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan publik;
  - 4) Penetapan *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap kualitas pelayanan badan-badan publik;
  - 5) Transparansi dan mekanisme penanganan terhadap segala kasus yang berkenaan dengan kebijakan publik.
- d. Keefektivitasan lembaga pemerintahan kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan ditingkatkan dengan :
- 1) Pengayaan alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasi aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat;
  - 2) Peningkatan hubungan antar daerah di bidang politik, sosial kemasyarakatan;
  - 3) Peningkatan pemahaman publik tentang program dan kinerja kebijakan publik;
  - 4) Realisasi dari program-program yang telah disusun dan disepakati bersama;
  - 5) Pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan program kebijakan publik.
- e. Pengembangan budaya politik yang sehat dilakukan dengan :
- 1) Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (*egalitarianism*), anti kekerasan, toleransi politik,



- keadilan dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengenalan dan pengamalan cara berpolitik yang sehat dalam segala bentuknya;
  - 3) Peningkatan kualitas dan jumlah partisipasi *stakeholders* kota dalam penetapan kebijakan publik;
- f. Media komunikasi politik disediakan dengan cara:
- 1) Perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;
  - 2) Perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media massa yang independen;
  - 3) Penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat;
  - 4) Kemudahan akses alur informasi;
  - 5) Perwujudan media sebagai sarana penyampaian informasi dan berita terbaru.
3. Sasaran keberhasilan dalam mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum antara lain adalah:
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
  - b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara berpolitik;
  - c. Meningkatnya *Good Governance* dalam tata kelola badan-badan publik;
  - d. Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi *stakeholders* kota dalam penyelenggaraan tata kelola kota mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
  - e. Meningkatnya komunikasi yang interaktif dan pemerintah dan masyarakat secara intensif.

#### **V.1.7. Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional**

1. Mewujudkan visi Kota Malang dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima

diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

2. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip—prinsip supremasi hukum, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas didukung dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “*Good Governance and Clean Government*”.
3. Lima aspek penting dalam politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu:
  - a. Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten serta mencerminkan ketertiban dan keadilan dapat tercapai apabila:
    - 1) Produk hukum yang berkeadilan;
    - 2) Penegakan hukum yang konsisten dan efektif;
    - 3) Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan;
    - 4) Partisipasi dan tanggungjawab warga kota yang tinggi;
    - 5) Tingginya kesadaran masyarakat akan hukum dan ketertiban kota.
  - b. Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, dengan cara:
    - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
    - 2) Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kota Malang;
    - 3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional;
    - 4) Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan anti KKN.
  - c. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan penyelenggaraan pemerintah Kota Malang dengan cara :
    - 1) Meningkatnya efisiensi fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan;
    - 2) Meningkatnya efektifitas fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan;
    - 3) Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan;
    - 4) Meningkatnya pengawasan kinerja kelembagaan pemerintahan.
  - d. Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* pemerintah Kota Malang dengan cara :
    - 1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan;
    - 2) Meningkatnya transparansi pemerintahan;
    - 3) Meningkatnya responsibilitas pemerintahan;
    - 4) Meningkatkan kewajaran pemerintahan.

- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ditujukan untuk peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum dengan cara:
  - 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - 2) Peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung penegakan hukum;
  - 3) Penegakan peraturan daerah secara konsisten;
  - 4) Penegakan hukum tanpa memandang kepentingan pribadi ataupun golongan;
  - 5) Peningkatan kinerja penegak hukum secara profesional.
- 4. Sasaran keberhasilan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional;
  - a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *Good Governance and Clean Government*
  - b. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum
  - c. Meningkatnya kepuasan warga terhadap layanan publik
  - d. Terselenggaranya penegakan hukum tanpa memandang kepentingan pribadi ataupun golongan.

**V.1.8. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

- 1. Masyarakat Malang yang agamis adalah wujud masyarakat Malang di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlaq mulia serta berkehidupan harmonis, didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2. Arah pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis, dicapai melalui : Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, diarahkan dengan;
    - 1) Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya.

- 2) Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia.
  - 3) Membangun fasilitas peribadatan sesuai dengan tingkatan kebutuhannya.
- b. Peningkatan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama, diarahkan dengan :
- 1) Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antarumat beragama.
  - 2) Mendorong upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat.
  - 3) Mengembangkan kesadaran diri mengenai realitas multikulturalisme dan makna kemajemukan sosial.
  - 4) Mendorong upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas moral aparatur daerah menuju tata pemerintahan yang amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah, dicapai melalui:
    - a) Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah;
    - b) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah; dan
    - c) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

**V.1.9. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan**

Arah pembangunan untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan dicapai melalui penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan keserasian pemanfaatan ruang kota, pendayagunaan sumber daya alam, dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.

1. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan dengan:
  - a. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah;

- b. Mewujudkan penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
  - c. Mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang daerah diarahkan dengan:
    - a. Menekankan fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan daerah;
    - b. Mengembangkan Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis komprehensif untuk mengurangi konflik kepentingan-baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok.
  3. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan diarahkan dengan:
    - a. Merencanakan seluruh fungsi dan manfaat SDA secara seimbang dan memperhatikan daya dukung serta kemampuan pulih alaminya;
    - b. Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang telah berada dalam kondisi kritis hingga pulih daya dukungnya;
    - c. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam rangka menuju realisasi ketersediaan ruang terbuka (publik dan privat) sebesar 30 %;
    - d. Memanfaatkan aspek-aspek tak berwujud SDA seperti jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan;
    - e. Meningkatkan upaya-upaya untuk melestarikan aset lingkungan buatan dalam bentuk bangunan-bangunan dan lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan seperti diamankan dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
  4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan diarahkan dengan:
    - a. Meningkatkan intensitas penanaman kecintaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan yang bernilai historis terutama bagi generasi muda;
    - b. Meningkatkan jumlah generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu sumber daya alam, lingkungan hidup;
    - c. Meningkatkan sosialisasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
  5. Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diarahkan dengan:

- a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang rehabilitasi kerusakan lingkungan;
  - b. Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - c. Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan;
  - d. Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan.
6. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan dengan:
- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan yang mendudukkannya sebagai aset kota;
  - d. Menekankan bahwa pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan hidup.

#### **V.1.10. Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera**

Kota Malang yang sejahtera merupakan tingkatan taraf hidup masyarakat secara optimum baik dari sisi pendapatan perkapita, peningkatan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat serta berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi di Malang masa 20 tahun mendatang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Malang yang sejahtera, pemerintah kota memfasilitasi, mendorong dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat yang kurang dan atau tidak mampu secara ekonomi.

Arah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi dicapai melalui: Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan masyarakat; Meningkatkan pendapatan masyarakat; Pemberdayaan peran perempuan; Pembangunan pemuda dan olah raga; Pembangunan kesejahteraan sosial; Pengembangan sistem jaminan sosial; dan Pembangunan sistem ketahanan pangan.

1. Pembangunan di bidang kesehatan masyarakat dalam 20 tahun ke depan secara umum diarahkan untuk terwujudnya Kota Malang sebagai kota sehat

dalam arti yang luas, yang ditandai oleh kondisi masyarakat yang (1) hidup di lingkungan yang sehat, (2) mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, (3) mampu menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga (4) memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

2. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat maka strategi yang dijalankan adalah:
  - a. Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat,
  - b. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan,
  - c. Meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan balita, anak usia sekolah dan lansia serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit,
  - d. Meningkatkan penyehatan lingkungan
3. Peningkatan layanan kesehatan dalam rangka pengendalian terhadap Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan dengan :
  - a. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas;
  - b. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
  - c. Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
  - d. Peningkatan peran pemerintah Indonesia dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial;
  - e. Pengenalan pendidikan seks dan reproduksi sejak dini serta gambaran keluarga ideal.
4. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap Iayanan sosial dasar ditingkatkan melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan;
  - b. Perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat;
  - c. Peningkatan kualitas gizi masyarakat;
  - d. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan;
  - e. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka rneningkatkan daya saing bangsa;

5. Kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dilakukan dengan memfasilitasi, mendorong melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan:
  - a. Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal;
  - b. Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula;
  - c. Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi sumber daya manusia;
  - d. Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global;
  - e. Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antarsemua pihak yang berkepentingan.
  
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan:
  - a. Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal;
  - b. Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula;
  - c. Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi sumber daya manusia;
  - d. Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global;
  - e. Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antarsemua pihak yang berkepentingan.
  
7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - b. Memantapkan dukungan sistem hukum dan perlindungan sosial;



- c. Menyediakan sarana pelayanan sosial yang memadai;
  - d. Meningkatkan derajat melalui pembentukan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat;
  - e. Memantapkan mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap;
  - f. Membina kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
8. Pengembangan sistem jaminan sosial diarahkan dengan:
- a. Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi lemah (tidak mampu) hingga sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  - b. Mengembangkan budaya tolong menolong sebagai tradisi yang telah berakar di masyarakat.
9. Pemberdayaan peran perempuan diarahkan dengan:
- a. Meningkatkan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
  - b. Menurunkan intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di daerah;
  - d. Mendorong terbentuknya Keluarga yang ideal melalui Keluarga Berencana.

## **V.2. TAHAPAN SKALA PRIORITAS**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Malang Tahun 2005 — 2025, maka pembangunan Kota Malang dilakukan dengan perencanaan pembangunan lima tahunan, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah sesuai dengan pentahapan sebagai berikut:

### **V.2.1 RPJM Ke-1 (2005-2009)**

RPJM Daerah ke-1 (2005-2009), merupakan tahap Peningkatan Daya Saing yang berkualitas. Periode ini merupakan suatu fase yang sangat penting, karena dalam periode ini diletakkan dasar-dasar dalam upaya bersama-sama semua *stakeholders* untuk menyamakan langkah untuk menuju upaya peningkatan daya saing disegala bidang dengan kualitas tinggi.

### **V.2.2 RPJM Ke-2 (2010-2014)**

RPJM Daerah ke-2 (2010-2014), merupakan tahap Pemantapan Infrastruktur Pembangunan kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal. Periode ini merupakan fase lanjutan yang bertujuan untuk Memantapkan “infrastruktur” pembangunan kota Malang melalui

penataan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM di semua sektor pelayanan, serta peningkatan pelayanan *public* sesuai dengan didukung dengan kemampuan pemanfaatan IT di segala bidang.

### **V.2.3 RPJM Ke-3 (2015-2019)**

RPJM Daerah ke-3 (2015-2019), merupakan tahap Pembangunan Malang Menuju kualitas Global dengan kearifan Lokal. Tahun 2015 sebagai awal dimulainya pasar bebas, menuntut suatu kondisi kesiapan Kota Malang menghadapi pasar bebas. Pada fase ini harus dilakukan upaya-upaya untuk Memantapkan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh melalui pembangunan pendidikan yang beorientasi global dengan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang berkemampuan penguasaan dan pengembangan IPTEKS dalam merespon persaingan global di era pasar bebas.

### **V.2.4 RPJM Ke-4 (2020-2024)**

RPJM Daerah ke-4 (2020-2024), merupakan fase terwujudnya visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawaskan lingkungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kota Malang.

Pentahapan di atas merupakan suatu kerangka garis besar ketercapaian, dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan pembangunan. Kerangka pentahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang diterjemahkan ke dalam rencana jangka menengah, yang didukung dengan sasaran tahunan yang lebih kongkrit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

RPJP Daerah Kota Malang 20 tahun ke depan merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Malang 20 tahun ke depan. Implementasi RPJP Daerah dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui RPJM Daerah secara berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif *stakeholders* pembangunan kota Malang guna menjamin terwujudnya visi dan misi kota Malang yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode pembangunan 20 tahun mendatang. RPJP Daerah Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mengacu pada rumusan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah yang menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan menjadi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dengan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025, Pemerintah Daerah dan Legislatif secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJP Daerah Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Dokumen Perencanaan daerah lainnya yang lebih operasional.
5. RPJP Daerah Tahun 2005-2025 ini merupakan dokumen yang memberikan arahan garis besar pembangunan Kota Malang 20 tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka 20 tahun dikukuhkan melalui pentahapan sebagai berikut: (1) **Tahap pertama:**

RPJM I (2005-2009), merupakan tahap Peningkatan Daya Saing yang berkualitas. (2) **Tahap ke dua:** RPJM II (2010-2014), merupakan tahap Pemantapan Infrastruktur Pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal. (3) **Tahap ke tiga:** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang III (2015-2019), merupakan tahap Pembangunan Malang Menuju kualitas Global dengan kearifan Lokal. dan (4) **Tahap ke empat:** RPJM IV (2020-2024), merupakan fase terwujudnya visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawaskan lingkungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Malang. Pentahapan di atas merupakan suatu kerangka garis besar ketercapaian, dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan pembangunan. Kerangka pentahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus diterjemahkan ke dalam rencana jangka menengah, yang didukung dengan sasaran tahunan yang lebih kongkrit.

Keberhasilan pembangunan Kota Malang dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat yang sejahtera" harus didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) (3) Konsistensi kebijakan pemerintah kota; (4) Pengelolaan tata kelola pemerintah oleh aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional; (5) Keberpihakan kepada ekonomi rakyat; dan (6) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; serta (7) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Sebagai dokumen resmi pemerintah kota yang harus ditaati oleh semua *stakeholders*, maka dalam rangka sosialisasi substansi RPJP Daerah, pemerintah kota berkewajiban untuk menyebarluaskan RPJP Daerah dalam bentuk ringkasan substansi RPJP Daerah secara berkelanjutan.

**WALIKOTA MALANG,**



**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**